

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2014





Ikhtisar Eksekutif Hal- i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Ternate tahun 2014, disusun berpedoman pada Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014. Penetapan Kinerja tersebut disusun pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah mengacu (RPJM) Kota Ternate tahun 2011-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun 2014 dan Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Ternate tahun 2014. LAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2014, dibuat untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebagaimana yang diwajibkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Pemerintah Kota Ternate yang diukur dan dievaluasi dalam LAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2014 adalah indikator kinerja sasaran sesuai dengan penetapan kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014. Hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal, menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014 berada pada kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata capaian kinerja indikator sasaran tahun 2014 yaitu **sebesar 103,53%.** Dari 11 (sebelas) sasaran pada penetapan kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014, semuanya mencapai hasil optimal ≥ 85%. Capaian kinerja 11 (sebelas) sasaran strategis tahun 2014 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	CAPAIAN
1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	92,83%
2	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	104,34%

Ikhtisar Eksekutif Hal- ii

3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	93,98%	
4	Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	102,92%	
5	Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	99,33%	
6	Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	124,74%	
7	Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.		
8	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas 95,48%		
9	Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir		
10	Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya	115,35%	
11	Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	102,38%	

11 (sebelas) sasaran strategis tersebut di atas, mempunyai indikator kinerja sebanyak 83 (delapan puluh tiga) indikator. Dari 83 (delapan puluh tiga) indikator tersebut, 75 (tujuh puluh lima) indikator sasaran (90,37%) mencapai nilai optimal ≥85,00% dan hanya 8 (delapan) indikator sasaran (9,64%) yang nilai capaiannya kurang optimal <85,00%, yaitu:

- Angka kesembuhan penderita TB paru nilai capaian 58,88%, nilai capaian rendah disebabkan mobilisasi penderita yang tinggi, kurangnya kesadaran penderita memeriksa kembali pada akhir pengobatan (follow up) dan kurangnya kepatuhan penderita dalam berobat.
- 2. Angka kematian Bayi, nilai capaian 46,67%. rendahnya nilai capaian tersebut karena pada tahun 2014 kematian bayi masih tinggi yang disebabkan: BBLR (berat badan lahir rendah), asfeksia pada bayi (kesulitan bernafas saat lahir), mengalami tetanus, sepsis/infeks, kelainan kognital/cacat bawaan, aspirasi (tersendak air susu), pneumonia, diare dan malaria.

Ikhtisar Eksekutif Hal- iii

3. Presentase balita gizi buruk nilai capaian 21,11%, rendahnya capaian disebabkan terjadinya peningkatan kasus gizi buruk yang disebabkan: adanya penyakit penyerta (TB, Broncopnemonia, Malaria, ISPA, Diare, Anemia), faktor ekonomi (masih kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga), pola asuh, mobilisasi dan kegiatan promosi belum berjalan maksimal.

- 4. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk nilai capaian 75,00%, rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan:
 - Sarana pelayanan kesehatan yang tersedia di Kota Ternate belum memungkinkan di bukanya formasi penerimaan tenaga spesialis (Kota Ternate belum memiliki Rumah Sakit).
 - 2. Bertambahnya jumlah penduduk tidak diiringi dengan penambahan tenaga dokter spesialis.
 - 3. Adanya mutasi dokter spesialis ke Provinsi karena tidak tersedianya sarana pelayanan yang sesuai untuk dokter bersangkutan.
- 5. Tingkat pengangguran terbuka nilai capaian 47.02%, hal tersebut disebabkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pada tanggal 12 Januari 2014 tentang mineral dan batubara berupa pelarangan export mineral mentah sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran pada perusahaan tambang di Maluku Utara. Sebagai pusat perekonomian di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate menjadi tempat tujuan utama para mantan karyawan tersebut untuk mencari kerja dan juga karena sebagian pekerja pada perusahaan tambang tersebut adalah penduduk Kota Ternate.
- 6. Tingkat Inflasi, nilai capaian 56,03%. Target kinerja inflasi tahun 2014 sebesar 4,50% realisasi 9,78%, rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan adanya peralihan musim yang menyebakan tingginya gelombang diperairan Maluku Utara yang mempengaruhi laju distribusi serta kapasitas produksi sektor perikanan dan juga faktor komoditas yang berasal dari kelompok komoditas bergejolak (volatile foods) yang merupakan komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak kerena faktor-faktor tertentu.

Ikhtisar Eksekutif Hal- iv

7. Rasio penduduk ber-KTP nilai capaian 77,50%, rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah untuk melakukan perekaman data. Tingkat kesadaran juga sangat dipengaruhi oleh asumsi tentang kebutuhan akan data kependudukan yang akurat. Masih banyak penduduk wajib KTP yang belum dilakukan perekaman data karena datanya masih salah dan mereka enggan melakukan perubahan terhadap data (KK-nya) terlebih dahulu.

8. Rasio penduduk ber-KK nilai capaian 77,50%, disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat yang telah berkeluarga untuk memiliki kartu keluarga sendiri dan juga sebagian anggota masyarakat yang telah berkeluarga belum ingin memisahkan diri karena masih tinggal serumah dengan orang tuanya, sehingga mereka masih tercatat sebagai anggota keluarga pada kartu keluarga orang tuanya. Juga belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya memiliki kartu keluarga.

Kelemahan tersebut diatas, diprioritaskan untuk segera dibenahi dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya.

Dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai maupun kekurangan/kelemahan sebagaimana tergambar dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014, maka hal tersebut akan dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Ternate kedepan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Ternate, 22 Maret 2014



DAFTAR ISI

		EKSEKUTIF	
BAB	l	PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. GAMBARAN SINGKAT KOTA TERNATE C. ORGANISASI D. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN TAHUN 2014 E. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014	
BAB	II	A. RENCANA STRATEJIK a. Visi b. Misi c. Permasalahan dan isu-isu pembangunan d. Tujuan e. Sasaran f. Sasaran Prioritas Program Pembangunan Tahun 2014- g. Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014	
BAB I	II	AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA a. Penetapan Kategori Nilai Capaian b. Pengukuran Kinerja B. ANALISA CAPAIAN KINERJA C. ANALISA TREND CAPAIAN KINERJA D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	
BAB I		PENUTUPan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaporan merupakan fase yang sangat penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen moderen, pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan instrumen untuk evaluasi guna perbaikan manajemen itu sendiri.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Laporan akuntabilitas adalah merupakan media pertanggungjawaban kepada publik atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah yang dibuat setiap berakhirnya tahun anggaran, yang didasarkan pada perencanaan stratejik yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja intansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2014, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kota Ternate sebagai daerah otonom, mempunyai hak untuk menyelenggarakan otonomi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan. Salah satu media pertanggungjawaban tersebut adalah LAKIP yang dibuat setiap berakhirnya tahun anggaran.

B. GAMBARAN SINGKAT KOTA TERNATE

a. Yuridis

Secara yuridis peningkatan status Kota Ternate dari Kota Administratif Ternate menjadi Kotamadya Ternate didasarkan pada Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1999 Tanggal 27 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate. Aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan di Kota Ternate pada awal pembentukannya, secara administratif dibagi menjadi 3 Kecamatan dan terdiri dari 58 Desa/Kelurahan. Dinamika pelaksanaan pembangunan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat telah membawa perubahan yang ditandai perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan pertimbangan rentang kendali pemerintahan, wilayah tertentu dimana perkembangannya dipandang memungkinkan untuk ditingkatkan status administrasinya seperti Moti, terkait dengan itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Moti yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Sebagai konsekuensi pelaksanaan Perda dimaksud, 4 (empat) Desa yang ada di Moti dimekarkan dan ditingkatkan statusnya menjadi 6 (enam) Kelurahan.

Perkembangan lain yang dicapai dari segi administrasi pemerintahan adalah dimekarkannya 2 (dua) Kelurahan di Batang Dua, Kecamatan Pulau Ternate menjadi 5 (lima) Kelurahan, melalui Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan Lelewi, Bido dan Pantai Sagu.

Selanjutnya pada akhir tahun 2007 Kota Ternate dimekarkan menjadi 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua dan 11 (sebelas) kelurahan baru yang dimekarkan pada tahun 2007. Pada tahun 2009 dibentuk Kecamatan Hiri dan dilakukan pemekaran kelurahan baru sebanyak 3 (tiga) kelurahan.

Tabel: Wilayah Kecamatan & Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Ternate Utara	14
2	Ternate Tengah	15
3	Ternate Selatan	17
4	Pulau Ternate	13
5	Moti	6
6	Hiri	6
7	Batang Dua	6
Jumlah		77

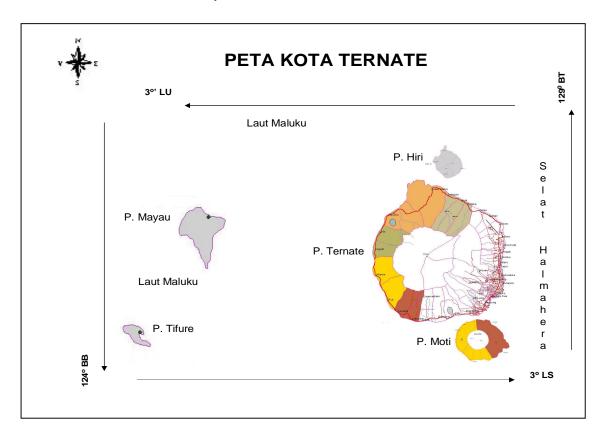
b. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

Wilayah Kota Ternate terletak pada 0°-2° Lintang Utara dan 126°-128° Bujur Timur. Luas wilayah Kota Ternate adalah 5.795,40 Km² dan didominasi oleh wilayah laut 5.547,55 Km² sedangkan luas daratan 162,03 Km². Kota Ternate berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku;
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku;
- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera; dan
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku.

Kota Ternate adalah Kota Kepulauan dan terdiri dari 8 pulau, meliputi:

- 1. Pulau Ternate
- 2. Pulau Hiri
- 3. Pulau Moti
- 4. Pulau Mayau
- 5. Pulau Tifure
- 6. Pulau Maka
- 7. Pulau Mano
- 8. Pulau Gurida



Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate

c. Topografi

Sebagian besar Kota Ternate adalah daerah bergunung, berbukit, dan terdiri dari pulau vulkanis, karang dengan kondisi jenis tanah sebagai berikut:

- 1. Rogusal: Pulau Ternate
 - Hiri
 - Moti
- 2. Rensika: Pulau Mayau
 - Pulau Tifure
 - Pulau Maka
 - Pulau Mano
 - Pulau Gurida

d. Kondisi Iklim

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara yang didominasi wilayah laut, Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis yang terdiri dari dua musim (*Utara-Barat* dan *Timur-Selatan*) yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keragaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah: 0-499 M, Sedang: 500-699 M, dan Tinggi: lebih dari 700 M). Dengan kondisi tersebut, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 pulau, 5 pulau yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan pulau Tifure didiami penduduk, sedangkan untuk 3 pulau kecil yaitu pulau Maka, Mano dan Gurida, tidak berpenghuni.

e. Demografis

Sampai dengan akhir tahun 2013, jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan data dari BPS Kota Ternate tahun 2013 sebanyak 20.728 jiwa. Penduduk tersebut tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Wilayah Kecamatan Ternate Selatan 69.589 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Utara 49.752 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Tengah 56.844 jiwa, Wilayah Kecamatan Pulau Ternate 16.039 jiwa, Wilayah Kecamatan Moti 4.803 jiwa, Wilayah Kecamatan Batang Dua 2.715 jiwa, Wilayah Kecamatan Hiri 2.986fff jiwa.

C. ORGANISASI

Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, sampai dengan akhir tahun 2014 Pemerintah Kota Ternate telah membentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Sekretariat Daerah;
- 2) 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) 17 (tujuh belas) organisasi Dinas Daerah;
- 4) 8 (delapan) organisasi Badan Daerah;
- 5) 1 (satu) Inspektorat;
- 6) 4 (empat) organisasi Kantor;
- 7) 3 (tiga) Perusahaan Daerah;
- 8) 7 (tujuh) organisasi Pemerintah Kecamatan;
- 9) 77 (tujuh puluh tujuh) Pemerintah Kelurahan.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN TAHUN 2014

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Ternate tahun 2014 yang diatur dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor: 14 Tahun 2010 Tanggal 12 April 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun 2014, adalah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Peningkatan Ekonomi Rakyat, yang selanjutnya akan dianalisa Program/Kegiatan untuk diselaraskan dalam tahapan proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan sebagai acuan pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Ternate tahun 2014.

Program Prioritas Pembangunan Kota Ternate adalah sebagai berikut:

- Peningkatan dan penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah pada Kecamatan-Kecamatan di luar kawasan perkotaan.
 - b. Pemerataan pelayanan air bersih pada kawasan dataran tinggi di Pulau Ternate dan pada Kecamatan di luar Ternate (Hiri, Moti dan batang Dua).
 - c. Pemerataan pelayanan Listrik pada Kelurahan yang tidak terjangkau layanan PLN, melalui sumber energi alternatif lainnya.
- 2. Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Memperbaiki Sarana Pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkatan.
 - b. Mewujudkan Pendidikan Dasar yang berkualitas dengan mengalokasi dana penunjang kegiatan sekolah melalui APBD untuk menutupi kekurangan dana Bantua Operasional Sekolah.
 - c. Menyediakan Buku Pelajaran di Perpustakaan Sekolah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Mengurangi Beban Orang Tua Siswa.
 - d. Memfasilitasi dan Membantu Guru untuk Mendapatkan Gelar S1.
 - e. Memberikan Beasiswa kepada Pelajar Berprestasi mulai SD, SMP, SMA, yang diprioritaskan pada siswa dari Warga Kurang Mampu dengan indikator penilaian yang terukur dan konsisten.

- f. Memberikan Beasiswa kepada Guru Berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di daerah.
- g. Memberikan Insentif kepada Guru yang bertugas di daerah terpencil, atau daerah dengan jarak jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.
- 3. Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Perbaikan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan dokter dan Tenaga Keperawatan, serta Obat-obatan pada setiap Puskesmas/Pustu/Polindes, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
 - b. Memberikan insentif kepada Bidan Desa atau tenaga Kesehatan di daerah terpencil, atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.
 - c. Memberikan Beasiswa kepada Dokter, Tenaga Medis Putra/Putri Daerah Berprestasi terutama dari Keluarga Kurang Mampu untuk melanjutkan ke jenjang Spesialis atau ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
 - d. Pelayanan Jamkeda, secara efektif, tepat sasaran, pelayanan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin, dengan pengawasan dan evaluasi berkala agar penyelenggarannya terus diperbaiki.
 - e. Menetapkan kebijakan subsidi silang; setiap pasien rawat inap pengguna fasilitas VIP, Kelas I dan Kelas II, mensubsidi pasien kurang mampu yang menggunakan fasilitas rawat inap Kelas III.
 - f. Memberikan layanan Ambulance dan Mobil Jenazah Gratis serta menggratiskan Layanan Bersalin untuk Warga Kurang Mampu.
- **4. Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Menetapkan *One Village One Program* (Satu Kelurahan, Satu Program Unggulan), yang didahului dengan penguatan kapasitas Aparatur, pemantapan Visi Misi Kelurahan dan identifikasi potensi unggulan setiap Kelurahan.
 - b. Membangun Rumah layak Huni Keluarga Kurang Mampu melalui dana stimulus Pemerintah Daerah dengan cara menggalang keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/Bari).

- c. Membangun infrastruktur lingkungan melalui dana stimulus pemerintah daerah dengan cara menggalang keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/Bari).
- d. Santunan Kematian Warga Kurang Mampu.
- e. Bantuan Dana Rutin untuk Masjid/Gereja dan tempat ibadah lainnya.
- f. Dana Pembinaan Generasi Muda untuk kegiatan usaha produktif dan atau pengembangan prestasi, minat dan bakat.
- g. Menggalang kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan terhadap One Village One Program.
- 5. Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukun Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Penataan kawasan Pasar Gamalama, Tapak I Plus dan Tapak II, sebagai sentra perekonomian modern dengan aksentuasi ornamen kebudayaan lokal.
 - b. Mengoptimalkan Pasar Bastiong, Pasar Dufa-Dufa, Pasar Kotabaru dan Pasar Sasa sebagai Pasar Tradisional dengan dukungan regulasi pemerintah.
 - c. Penataan taman kota dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib.
 - d. Pemantapan Visi dan penataan kawasan Kota Baru berbasis pendidikan dan berciri lokal secara terpadu dan akomodatif terhadap masyarakat setempat.
 - e. Penataan area depan kedaton kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai ruang terbuka hijau berciri budaya, yang dijadikan alun-alun kota dan taman ekspresi seni budaya.
 - f. Mendorong program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai kota pesisir yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.
 - g. Mewujudkan Ternate Bebas Sampah dan Bebas Banjir, yang diutamakan pada kawasan perkotaan dan kawasan lainnya yang menimbulkan kesan kumuh.
- 6. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawah, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif, dan Responsif, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.

- b. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya.
- c. Mengubah *mainset* aparatur yang berorientasi program dengan target serta manfaat terukur, aparatur yang berkarakter demokratis dan terbuka dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
- d. Menyelenggarakan prinsip *reward and punishman* untuk menilai kinerja dan prestasi aparatur dalam rotasi maupun promosi jabatan.
- e. Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur yang diorientasikan pada peningkatan skill dan ketrampilan yang benar-benar dibutuhkan.
- f. Penyerahan urusan (kewenangan) dari Pemerintah Kota kepada Kecamatan dan Kelurahan di bidang pelayanan umum.
- 7. Peningkatan Ekonomi Rakyat, Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat kurang mampu.
 - b. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi investor.
 - c. Pengembangan Koperasi, UMKM, Pedagang Tradisional dan PKL melalui fasilitas bantuan modal usaha, berupa dana bergulir atau pinjaman lunak, dengan pendampingan manajemen, penyediaan sarana produksi dan akses pasar.
 - d. Meningkatkan Kesejahteraan Buruh dan Pekerja pada sektor swasta melalui peningkatan Upah Minimum Kota.
 - e. Memberikan bantuan modal usaha kepada Kelompok Perempuan dan Kelompok Pemuda.
 - f. Menggalakkan kursus dan pelatihan kepada pengangguran terbuka *unskill*, untuk diarahkan pada usaha kecil menengah yang didukung penyertaan modal dan pendampingan manajemen.
- 8. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Membentuk lembaga perijinan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

- b. Menghilangkan segala bentuk pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merusak citra pelayanan publik.
- c. Menyediakan Database Kependudukan Online.
- d. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran Gratis dan dilimpahkan ke Kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat.
- 9. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara Berkelanjutan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - Melakukan pemetaan potensi masyarakat pesisir untuk merumuskan program pengembangan yang tepat.
 - b. Bantuan fasilitas sarana dan peralatan kepada Petani dan Nelayan untuk meningkatkan produktifitasnya.
 - c. Memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan.
 - d. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan pemberdayaan.
- 10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate pada semua tingkatan sekolah sejak Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi.
 - b. Mengoptimalkan fungsi Taman Pengajian Al-Qur'an sebagai tempat pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sekaligus memberikan pemahaman tentang Syariah, Akhlaq, Budi Pekerti sejak Usia Dini dan Sekolah Dasar.
 - c. Mengoptimalkan pembinaan Jemaat dan pembinaan Ummat Agama non Muslim sesuai dengan syariat agamanya.
 - d. Membina Kerukunan antar Ummat Beragama, antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui kegiatan sosial keagamaan dan kebudayaan. Memanfaatkan momentum Hari-hari Besar Nasional, Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari-hari Besar Daerah dengan kegiatan bernuasa Keagamaan dan Kebudayaan. Melestarikan Situs, Artifak, Dokumen Sejarah dan Aset Seni Budaya Kota Ternate.

- e. Menjamin kesejahteraan Imam Mesjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing Jemaat.
- f. Menjamin pelestarian adat dan budaya Ternate.
- 11. Penegakan Supermasi Hukum, Hak Azazi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Kontruktif, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - Mendorong regulasi daerah yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi.
 - b. Memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
 - c. Memperkuat regulasi yang menjamin Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.
 - d. Meninjau kembali Peraturan Daerah yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, terjadinya ekonomi biaya tinggi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat.
 - e. Memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada warga kurang mampu yang membutuhkannnya.
 - f. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan OKP dalam melakukan kampanye dan advokasi hakhak hukum kepada masyarakat.

E. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Prioritas pembangunan tahun 2014 merupakan tahapan untuk memantapkan pembangunan menuju Kota Ternate Bahari Berkesan. Tahap pembangunan ini mengutamakan membentuk Lembaga Perijinan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta menghilangkan segala bentuk Pungutan Liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merusak citra pelayanan publik. Disamping itu juga dilakukan pemetaan potensi masyarakat pesisir untuk merumuskan program pengembangan yang tepat dan memberikan bantuan fasilitas sarana dan peralatan kepada Nelayan untuk meningkatkan produktifitasnya.

Pembangunan di tahun 2014 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 2 (dua) program sebagai fokus utama pembangunan di tahap IV: **Pelayanan Publik**

yang Cepat, Murah dan Mudah Dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara berkelanjutan meliputi:

- a. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah; yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas. Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan tersebut, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan program Penataan Administrasi Kependudukan.
 - b. Urusan Wajib Kearsipan, dengan program sebagai berikut:
 - (1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
 - (2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
 - (3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
 - (4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
 - c. Urusan wajib komunikasi dan informatika, dengan program sebagai berikut:
 - (1) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
 - (2) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
 - (3) Program fasilitas peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
 - (4) Program kerjasama informasi dengan masa media.

Dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Membentuk lembaga perizinan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menghilangkan segala bentuk pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merusak citra pelayanan publik.
- c. Menyediakan Database kependudukan online.
- d. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran gratis dan limpahkan ke kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat.
- b. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara berkelanjutan; melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktifitas dan kemampuan daya saing.
 - Dalam upaya mewujudkan prioritas diatas, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan, dengan program sebagai berikut:
 - (1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
 - (2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
 - (3) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam penyalahgunaan sumberdaya laut.
 - (4) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut.
 - (5) Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritime kepada masyarakat.
 - (6) Program pengembangan budidaya perikanan.
 - (7) Program pengembangan perikanan tangkap.
 - (8) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan.
 - (9) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
 - (10) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar.
- b. Urusan pilihan perdagangan, dengan program sebagai berikut:
 - (1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
 - (2) Program peningkatan efisiensi perdagangan Dalam Negeri.
 - (3) Program pembinaan pedagang.
- c. Urusan pilihan perindustrian, dengan program sebagai berikut:
 - (1) Program peningkatan kapasitas Iptek Sistem Produksi.
 - (2) Program pengembangan industri kecil dan menengah.
 - (3) Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
 - (4) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.

Dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan potensi masyarakat pesisir untuk merumuskan program pengembangan yang tepat.
- b. Bantuan fasilitas sarana dan peralatan kepada petani dan nelayan untuk meningkatkan produktifitasnya.
- c. Memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan.
- d. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pendampingan pemberdayaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal yang ingin dicapai atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang hendak dicapai.

Dengan memperhatikan keinginan luhur dari para pendiri bangsa serta cerminan hati sanubari rakyat Kota Ternate untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah: Terwujudnya Ternate menjadi Kota "Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan" (Bahari Berkesan).

Penjelasan Visi tersebut, yaitu:

- 1. Ternate Berbudaya, bahwa kebijakan pemerintah maupun perilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya adat se atorang sebagai sumber nilai yang terbukti ampuh menjadi spirit sosial dan spirit moral Moloku Kie Raha pada masa kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya dan adat se atorang dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus menjadikannya sistem nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan terefleksi dalam perilaku sosial masyarakat.
- 2. Ternate Agamais, adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagamaan dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas upaya mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlaq, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagamaan sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tentram.

- 3. Ternate Harmonis, artinya mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabaian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembaruan, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun antar kelompok.
- 4. Ternate Mandiri, artinya menjadikan Ternate Kota Jasa dan Perdagangan sebagai pusat perekonomian Maluku Utara, melalui penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreativitas dan produktivitas melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar lebih produktif dan berdaya saing, yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.
- 5. Ternate Berkeadilan, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik di semua bidang yang diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs).
- 6. Ternate Berwawasan Lingkungan, artinya mengupayakan penataan pembangunan perkotaan yang seluruh arah perkembangannya didasarkan pada keasrian dan keaslian potensi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik perkotaan dan lingkungan hidup yang

hijau, asri, nyaman, dan sehat melalui penataan yang terpadu dan serasi antara lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang diharapkan memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian kepada warga masyarakat, sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan water front city, dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan.

b. Misi

Misi pembangunan Kota Ternate dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Ternate yang agamais;
- 2. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana perekonomian yang lebih representatif;
- 3. Membangun Ternate sebagai kota pesisir berbasis lingkungan;
- 4. Membangun Ternate sebagai kota pariwisata berciri budaya dan bahari;
- 5. Membangun Ternate sebagai kota terbuka, demokratis dan adil;
- 6. Membangun Ternate yang sehat dan sejahtera.

c. Permasalahan dan Isu-isu Pembangunan

Permasalahan dan isu-isu pembangunan Kota Ternate 2011-2015 adalah:

1. Masalah Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi, relatif belum memadai sehingga belum mampu secara merata dan adil mendorong program dan kebijakan bagi kemandirian daerah, menjamin kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan utilitas lainnya.
- b) Mentalitas aparatur cenderung berorientasi proyek (*project oriented*) ketimbang berorientasi program. Kelemahan ini berimplikasi pada perencanaan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor relatif belum integratif dan sinergi, selanjutnya berimplikasi pada belum terpenuhinya azas efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam pengelolaan

- dan pemanfaatan anggaran secara patut, dan memberikan kemanfaatan yang luas serta berkeadilan kepada masyarakat.
- c) Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran (clean governance) sebagai implementasi prinsip-prinsip good governance.
- d) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan utilitas lainnya. Keluhan utamanya berkaitan dengan kepastian waktu, biaya dan tempat.
- e) Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor ketidakpastian pelayanan.
- f) Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kurangnya akses publik dalam perumusan kebijakan pembangunan kota.
- g) Pergeseran paradigma pemerintah bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan rakyat. Karena itu tugas camat/lurah mengikuti tugas walikota sebagai pelayan rakyat. Berdaya tidaknya kecamatan/kelurahan sangat tergantung pada pelimpahan wewenang oleh walikota. Besaran kewenangan kecamatan sangat ditentukan oleh urusan yang dilimpahkan oleh walikota.

2. Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan

- a) Tidak seimbangnya pertumbuhan antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah Kecamatan di luar Pulau Ternate, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b) Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi pedesaan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (*backwash effects*).
- c) Kurangnya akses masyarakat, terutama pelaku usaha jasa konstruksi terhadap proyek pemerintah akibat terjadinya praktek mafia ekonomi dan monopoli kepada beberapa pengusaha. Sulitnya pengusaha kecil, petani, nelayan dan koperasi mendapat sumber permodalan dan pendampingan manajemen pengembangan usaha.

- d) Informasi potensi dan peluang usaha belum optimal dipromosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memiliki peluang investasi yang cukup tinggi.
- e) Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktifitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.

3. Masalah Penataan Kawasan Perkotaan

- a) Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat pertambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota.
- b) Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung.
- c) Belum terintegrasinya keruangan (*spatial integration*) secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotaan.
- d) Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik.
- e) Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara integratif.
- f) Terabaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai.
- g) Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru sehingga mengakibatkan masyarakat pada kawasan sekitar membangun permukimannya tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang.
- h) Kesemrawutan kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkiran menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.

4. Masalah Banjir, Sampah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a) Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten.
- b) Penataan drainase dan pengelolaan persampahan yang belum memadai
- c) Minimnya kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai.
- d) Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.

5. Masalah Pendidikan dan Kesehatan

- a) Kualitas output pendidikan yang masih rendah sehingga belum mampu menjawab kesempatan kerja yang tersedia.
- b) Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.
- c) Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Hiri dan Pulau Batang Dua.
- d) Komersialisasi kesehatan ini ditandai dengan mahalnya biaya kesehatan akibat pelayanan Rumah Sakit yang belum profesional akibat Praktek Dokter Ahli lebih memilih berpraktek di Rumah Sakit swasta atau klinik ketimbang melayani pasien di RSU.
- e) Manajemen pelayanan Rumah Sakit yang belum mengakomodasi masyarakat miskin (jamkesda) dan Pemegang Askes.
- f) Masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan dalam APBD.
- g) Kematian ibu dan bayi, yang masih cukup tinggi adalah akibat dari buruknya akses pelayanan kesehatan yang tersedia.

6. Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan

- a) Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam penutupan jalan untuk acara-acara tertentu.
- b) Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus perkosaan dan meningkatnya

angka perceraian di Kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kaum wanita dan terpinggirnya peran wanita dalam pembangunan, seperti masih bias gender dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domestik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate ke depan.

- c) Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat.
- d) Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung.
- e) Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas *adat se atorang* sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya.
- f) Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan stakeholder di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal.
- g) Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa penguatan basis nilai relegiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama.
- h) Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

7. Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal

- a) Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate tergambar dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam Pendapatan Daerah Kota Ternate.
- b) APBD dibuat seringkali lebih berpihak kepada penentu kebijakan daripada kepentingan rakyat. Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja modal

(investasi) padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, air minum dan transportasi.

8. Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi riil di level mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksinya gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumber daya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

d. Tujuan

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2011-2015 berdasarkan 11 (sebelas) Program Prioritas adalah sebagai berikut:

- Peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan serta percepatan dan pemerataan infrastruktur pada Wilayah Kecamatan, yang diarahkan pada percepatan pengembangan infrastruktur secara merata dan berkeadilan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan;
- Mewujudkan pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas, yang diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia, khususnya peningkatan derajat pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik;
- 3. Mewujudkan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas, diarahkan pada upaya meningkatkan sumber daya manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik;

- 4. Kebijakan anggaran (APBD) yang proporsional dan pro rakyat, diarahkan pada kebijakan anggaran (APBD) yang proporsional dan pro rakyat, yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui disain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya;
- 5. Penataan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kota yang serasi antara kebutuhan dan daya dukung lahan, antara aspek topografi dan kawasan pantai/pesisir berbasis keterpaduan dan keserasian lingkungan sosial budaya dan ekologis, yang diarahkan pada penataan infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman, dan nyaman dan berciri budaya serta berwawasan lingkungan;
- 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa, serta birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif, yang diarahkan pada terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat;
- 7. Peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja, yang diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional, menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need);
- 8. Pelayanan publik yang cepat, murah dan mudah, yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas;
- Pengembangan masyarakat kawasan pesisir secara berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kemandirian masyarakat, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha

- mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktifitas, dan kemampuan daya saing;
- 10. Membangun kepedulian sosial, kesadaran nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat, yang diarahkan untuk menjawab permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalah-masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya;
- 11. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, yang diarahkan untuk menjawab masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik.

e. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011-2015, maka selanjutnya ditetapkan sasaran strategis Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011-2015, yaitu sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
1	2	
Tujuan 1: Peningkatan dan penataan i	nfrastruktur perkotaan serta	
percepatan dan pemerata	an infrastruktur pada wilayah	
kecamatan		
Sasaran strategis 1:	Persentase panjang jalan dalam	
Terwujudnya pemerataan infrastruktur di	kondisi baik di wilayah Kecamatan	
wilayah kecamatan di luar kawasan	di luar perkotaan	
perkotaan secara berkeadilan	2) Persentase Kelurahan pada	
	kawasan dataran tinggi yang	
	terlayani air bersih	
	3) Persentase kelurahan di wilayah	

kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN

Tujuan 2: Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas

Sasaran strategis 2:

Meningkatnya derajat pendidikan masyaratakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik

- 1) Indeks Pembangunan Manusia
- Angka melek huruf seluruh penduduk
- 3) Nilai UN dan UAS rata-rata
 - Nilai UN rata-rata SD
 - Nilai UAS rata-rata SD
 - Nilai UN rata-rata SLTP
 - Nilai UAS rata-rata SLTP
 - Nilai UN rata-rata SLTA
 - Nilai UAS rata-rata SLTA
 - Nilai UN rata-rata paket A
 - Nilai UAS rata-rata paket A
 - Nilai UN rata-rata paket B
 - Nilai UAS rata-rata paket B
 - Nilai UN rata-rata paket C
 - Nilai UAS rata-rata paket C
- 4) Angka kelulusan
 - SD
 - SLTP
 - SLTA
- 5) Angka putus sekolah
 - SD
 - SLTP
 - SLTA
- 6) Angka rata-rata lama sekolah
 - SD
 - SLTP
 - SLTA
- 7) Angka partisipasi murni
 - SD

- SLTA 8) Angka partisipasi kasar - SD - SLTP - SLTA 9) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah - SD - SLTP - SLTA 10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SL 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		
8) Angka partisipasi kasar - SD - SLTP - SLTA 9) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah - SD - SLTP - SLTA 10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		- SLTP
- SD - SLTP - SLTA 9) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah - SD - SLTP - SLTA 10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		- SLTA
- SLTP - SLTA 9) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah - SD - SLTP - SLTA 10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		8) Angka partisipasi kasar
- SLTA 9) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah - SD - SLTP - SLTA 10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		- SD
9) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah - SD - SLTP - SLTA 10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		- SLTP
terhadap penduduk usia sekolah - SD - SLTP - SLTA 10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		- SLTA
- SD - SLTP - SLTA 10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		9) Rasio ketersediaan sekolah
- SLTP - SLTA 10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 16) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		terhadap penduduk usia sekolah
- SLTA 10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		- SD
10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		- SLTP
pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		- SLTA
11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		10) Rasio jumlah RKB terhadap murid
pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		pada tingkat SD
12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		11) Rasio jumlah RKB terhadap murid
pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		pada tingkat SLTP
13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		12) Rasio jumlah RKB terhadap murid
tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		pada tingkat SLTA
14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup Meningkatnya derajat kesehatan 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		13) Rasio guru terhadap murid pada
tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: 1) Angka usia harapan hidup Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Malaria - TBC - DBD		tingkat SD
15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		14) Rasio guru terhadap murid pada
Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		tingkat SLTP
Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas Sasaran strategis 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat - Malaria - TBC - DBD		15) Rasio guru terhadap murid pada
Sasaran strategis 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD		tingkat SLTA
Meningkatnya derajat kesehatan 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD	Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Mui	rah, Terjangkau dan Berkualitas
masyarakat - Malaria - TBC - DBD	Sasaran strategis 3:	1) Angka usia harapan hidup
- TBC - DBD	Meningkatnya derajat kesehatan	2) Angka prevalensi penyakit
- DBD	masyarakat	- Malaria
		- TBC
		- DBD
- HIV		- HIV
3) Angka kematian kasar (per 1.000		3) Angka kematian kasar (per 1.000
penduduk)		penduduk)
- Karena penyakit Malaria		- Karena penyakit Malaria

- Karena penyakit TBC
- Karena penyakit DBD
- Karena penyakit HIV
- Angka kesembuhan penderita TB paru BTA
- Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
- 6) Angka kematian balita
- Angka kematian ibu melahirkan per
 100.000 kelahiran hidup
- 8) Persentase balita gizi buruk
- Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk
- Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk
- 11) Rasio bidan per 100.000 penduduk
- 12) Rasio perawat per 100.000 penduduk
- 13) Rasio Posyandu terhadap balita
- 14) Rasio Puskesmas per satuan penduduk
- 15) Rasio Pustu per satuan penduduk
- Persentase kecamatan bebas rawan gizi
- 17) Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam
- Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan
- Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan
- Rasio pederita malaria terhadap jumlah penduduk
 - Annual Malaria Incidence (AMI)

- Annual Parasite	Incidence	(API)
-------------------	-----------	------	---

Tujuan 4: Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat

Sasaran strategis 4:

Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat

- Rasio belanja langsung terhadap total belanja
- Rasio belanja modal terhadap total belanja
- Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan
- Persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP
- 5) Persentase peningkatan dana pembangunan Kelurahan
- 6) Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan
 - MCK Komunal
 - Drainase /gorong-gorong
 - Jalan lingkungan
- 7) Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda
- Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikasi tanah

Tujuan 5: Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis

Sasaran strategis 5:

Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu

- Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata
- Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan
- Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan
- Jumlah tempat pedagang kaki lima di pusat kota yang direlokasi

Tujuan 6: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif.

Sasaran strategis 6:

Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat

- Persentase PNS yang memperoleh penghargaan
- Persentase PNS yang diberikan sanksi berat
- Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu
- 4) Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK

Tujuan 7: Peningkatan Ekonomi Rakyat melalui Pengembangan Koperasi,
Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja

Sasaran strategis 7:

Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional

- Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha
- 2) Nilai modal kerja dan investasi UKM
- 3) Nilai omzet UKM
- Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan
- 5) Tingkat pengangguran terbuka
- 6) Pendapatan perkapita
- 7) Laju pertumbuhan ekonomi
- 8) Tingkat Inflasi

Tujuan 8: Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah

Sasaran strategis 8:

Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas

- Jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP
- Jumlah layanan perizinan bebas biaya
- 3) Jumlah tempat pelayanan publik

- yang telah difasilitasi dengan sarana memadai
- 4) Rasio penduduk ber-KTP
- 5) Rasio penduduk ber-KK
- 6) Rasio bayi ber-akte kelahiran
- Persentase ketersediaan armada sampah

Tujuan 9: Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah

Sasaran strategis 9:

Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir

- Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan
- Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan
- Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan

Tujuan 10: Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat

Sasaran strategis 10:

Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya

- Persentase siswa SD kelas VI beragama islam dapat baca tulis Al-Quran
- 2) Jumlah Taman Pengajian Al-Quran
- Jumlah pertemuan forum antar umat beragama
- Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan
- 5) Menurunnya pertumbuhan PMKS
- 6) Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate
- 7) Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate
- 8) Persentase situs budaya yang

	dilestarikan
Tujuan 11: Penegakan Supremasi H	ukum, Hak Azasi Manusia, untuk
Mendorong Partisipasi P	ublik yang Dinamis dan Konstruktif
Sasaran strategis 11:	1) Jumlah Peraturan Daerah yang
Tertanganinya masalah penegakan	diterbitkan
dan kepastian hukum di daerah	2) Persentase permasalahan hukum
	Pemerintah Kota Ternate yang
	dapat diselesaikan
	3) Jumlah kasus pelanggaran Perda
	yang dapat ditangani

f. Sasaran Prioritas Program Pembangunan Tahun 2014

Prioritas pembangunan tahun 2014 sesuai RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015, adalah untuk mewujudkan sasaran 8 dan 9, yaitu:

- Sasaran 8 : Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah; yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas.
- Sasaran 9 : Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara berkelanjutan; melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktifitas dan kemampuan daya saing.

g. Indikator Kinerja Utama Tahun 2014

Indikator kinerja utama (IKU) pembangunan Pemerintah Kota Ternate tahun 2014 adalah indikator kinerja sasaran yang ada dalam RPJMD Pemerintah Kota Ternate tahun 2011-2015, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2014 tersebut adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	56.32	%
2	Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	100.00	%
3	Indeks Pembangunan Manusia	78.13	%
4	Nilai UN dan UAS rata-rata		
	- Nilai UN rata-rata SD	5.50	
	- Nilai UAS rata-rata SD	7.50	
	- Nilai UN rata-rata SLTP	5.50	
	- Nilai UAS rata-rata SLTP	8.00	
	- Nilai UN rata-rata SLTA	5.50	
	- Nilai UAS rata-rata SLTA	8.00	
	- Nilai UN rata-rata paket A	6.00	
	- Nilai UAS rata-rata paket A	8.00	
	- Nilai UN rata-rata paket B	6.00	
	- Nilai UAS rata-rata paket B	8.00	
	- Nilai UN rata-rata paket C	6.00	
	- Nilai UAS rata-rata paket C	8.00	
5	Angka putus sekolah		
	- SD	0.06	
	- SLTP	0.08	
	- SLTA	0.10	
6	Angka partisipasi murni		
	- SD	98.00	%
	- SLTP	90.00	%
	- SLTA	91.00	%
7	Angka partisipasi kasar		
	- SD	103.00	%
	- SLTP	97.00	%
	- SLTA	92.00	%
8	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1:32	
9	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1:32	
10	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1:32	
11	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1:20	
12	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1:20	

13	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1:20	
14	Angka usia harapan hidup	71	Tahun
15	Angka prevalensi penyakit		
	- Malaria	< 1	‰
	- TBC	221/100.000	Pddk
	- DBD	< 3	‰
	- HIV	0,1/1.000	Pddk
16	Angka kematian kasar		
	- Karena penyakit Malaria	< 2 per 100.000	Pddk
	- Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000	Pddk
	- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000	Pddk
	- Karena penyakit HIV	<5 per 100.000	Pddk
17	Angka kesembuhan penderita TB paru BTA	89.00	%
18	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	3/1.000	KH
19	Angka kematian balita	3/1.000	KH
20	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	72/100.000	КН
21	Persentase balita gizi buruk	<0,2	%
22	Rasio pederita malaria terhadap jumlah penduduk		
	- Annual Malaria Incidence (AMI)	<20	‰
	- Annual Parasite Incidence (API)	< 1	‰
23	Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan		
	- MCK Komunal	16.67	%
	- Drainase /gorong-gorong	14.79	%
	- Jalan lingkungan	7.34	%
24	Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	55.83	%
25	Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	35.00	%
26	Tingkat pengangguran terbuka	4.10	%
27	Pendapatan perkapita	3,359,400	Rp
28	Laju pertumbuhan ekonomi	8.35	%
29	Tingkat Inflasi	4.50	%
30	Rasio penduduk ber-KTP	1:0,8	
31	Rasio penduduk ber-KK	1:0,8	
32	Rasio bayi ber-akte kelahiran	1:0,6	
33	Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	25	Klp.
34	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran	100.00	%

35	Menurunnya pertumbuhan PMKS	6.00	%
36	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	14	kasus

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

Sesuai dengan RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015, maka tahap pembangunan tahun 2014 merupakan tahapan untuk menyambung, melanjutkan dan menajamkan capaian tahun sebelumnya. Pembangunan Kota Ternate tahun 2014 lebih ditegaskan pada komitmen untuk penguatan pada 2 (dua) program sebagai fokus utama pembangunan di tahap IV, yaitu:

- 1. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah; yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas.
- Peningkatan ekonomi rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.

Namun demikian, 11 prioritas pembangunan Kota Ternate sesuai RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015 tetap dilaksanakan secara simultan dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang dianggap urgen untuk dilaksanakan dan ditetapkan pada Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014 adalah sebagai berkut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Sasaran strategis 1: Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	56.32 %
kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	100.00 %
	3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN	65.62 %

Sasaran strategis 2:	1	Indeks Pembangunan	78.13	%
Meningkatnya derajat pendidikan masyaratakat dengan perluasan akses	2	Manusia Angka melek huruf seluruh penduduk	100.00	%
pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan		•		
fasilitas yang memadai,	3	Nilai UN dan UAS rata-rata		
tenaga guru yang cukup		- Nilai UN rata-rata SD	5.50	
dan mutu yang terus membaik		- Nilai UAS rata-rata SD	7.50	
Illembaik		- Nilai UN rata-rata SLTP	5.50	
		- Nilai UAS rata-rata SLTP	8.00	
		- Nilai UN rata-rata SLTA	5.50	
		- Nilai UAS rata-rata SLTA	8.00	
		- Nilai UN rata-rata paket A	6.00	
		- Nilai UAS rata-rata paket A	8.00	
		- Nilai UN rata-rata paket B	6.00	
		- Nilai UAS rata-rata paket B	8.00	
		- Nilai UN rata-rata paket C	6.00	
		- Nilai UAS rata-rata paket C	8.00	
	4	Angka kelulusan		
		- SD	100.00	%
		- SLTP	100.00	%
		- SLTA	100.00	%
	5	Angka putus sekolah		
		- SD	0.06	
		- SLTP	0.08	
		- SLTA	0.10	
	6	Angka rata-rata lama sekolah		
		- SD	6	Tahun
		- SLTP	3	Tahun
		- SLTA	3	Tahun
	7	Angka partisipasi murni		
		- SD	98.00	%
		- SLTP	90.00	%
		- SLTA	91.00	%
	8	Angka partisipasi kasar		
		- SD	103.00	%
		- SLTP	97.00	%
		- SLTA	92.00	%

	9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia		
		sekolah - SD	1 : 192	%
		- SLTP	1:672	
		- SLTA	1:735	
		SEIT	1.700	70
	10	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1 : 32	
	11	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 32	
	12	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 32	
	13	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1 : 20	
	14	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 20	
	15	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 20	
Sasaran strategis 3:	1	Angka usia harapan hidup	71	Tahun
Meningkatnya derajat		Annales masseles et al. 19		
kesehatan masyarakat	2	Angka prevalensi penyakit		0/
		- Malaria	< 1	‰ Pddk
		- TBC	221/100.000	
		- DBD		
		- HIV	0,1/1.000	Fuuk
	3	Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk)		
		- Karena penyakit Malaria	'	Pddk
		- Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000	
		- Karena penyakit DBD	1 - - - -	Pddk
		- Karena penyakit HIV	<5 per 100.000	Pddk
	4	Angka kesembuhan penderita TB paru BTA	89.00	%
	5	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	3/1.000	KH
	6	Angka kematian balita	3/1.000	KH
	7	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	72/100.000	KH
	8	Persentase balita gizi buruk	<0,2	%

	9	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	20 : 100.000	Pddk
	10	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	9 : 100.000	Pddk
	11	Rasio bidan per 100.000 penduduk	120 : 100.000	Pddk
	12	Rasio perawat per 100.000 penduduk	230 : 100.000	Pddk
	13	Rasio Posyandu terhadap balita	1 : 60	
	14	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 20.000	
	15	Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 15.000	
	16	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100.00	%
	17	Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam	100.00	%
	18	Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100.00	%
	19	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	90.00	%
	20	Rasio pederita malaria terhadap jumlah penduduk		
		- Annual Malaria Incidence (AMI)	< 20	‰
		- Annual Parasite Incidence (API)	< 1	‰
Sasaran strategis 4:	1	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	46.29	%
Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	2	Rasio belanja modal terhadap total belanja	21,62	%
nanyat	3	Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100.00	%
	4	Persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP	100.00	%

	5	Persentase peningkatan Dana	100.00	%
		Pembangunan Kelurahan		
	6	Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan		
		- MCK Komunal	16.67	%
		- Drainase /gorong-gorong	14.79	%
		- Jalan lingkungan	7.34	%
	7	Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda	100.00	%
	8	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	30	KK
Sasaran strategis 5:	1	Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak	12	lokasi
Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa		yang ditata		
dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	2	Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan	75.58	%
	3	Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	55.83	%
	4	Jumlah tempat pedagang kaki lima di pusat kota yang direlokasi	2	lokasi
Sasaran strategis 6:	1	Persentase PNS yang memperoleh penghargaan	7.12	%
Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang	2	Persentase PNS yang diberikan sanksi berat	0.50	%
profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas	3	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100.00	%
pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	4	Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	35.00	%
Sasaran strategis 7:	1	Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan	3	Klp.
Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja,	2	modal usaha Nilai modal kerja dan investasi UKM	825,523,416,220.00	Rp
koperasi, usaha mikro kecil	3	Nilai omzet UKM	1,772,293,538,270.00	Rp
-				

menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan	4	Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	23	Klp.
pedagang tradisional.	5	Tingkat pengangguran terbuka	4.10	%
	6	Pendapatan perkapita	3,359,400	Rp
	7	Laju pertumbuhan ekonomi	8.35	%
	8	Tingkat Inflasi	4.50	%
Sasaran strategis 8: Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah,	1	Jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	6	SKPD
murah, nyaman dan berkualitas	2	Jumlah layanan perizinan bebas biaya	2	jenis
	3	Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai	10	Tempat
	4	Rasio penduduk ber-KTP	1 : 0,8	
	5	Rasio penduduk ber-KK	1:0,8	
	6	Rasio bayi ber-akte kelahiran	1:0,6	
	7	Persentase ketersediaan armada sampah	60.47	%
Sasaran strategis 9: Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	1	Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan	42	Klp.
madyaranan poolon	2	Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan	4	Klp.
	3	Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	25	Klp.
Sasaran strategis 10: Tertanganinya permasalahan	1	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran	100.00	%
menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan,	2	Jumlah Taman Pengajian Al- Quran yang dibina	147	TPQ
permasalahan sosial, dan budaya	3	Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	4	Kali
	4	Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan	40	Orang
	5	Menurunnya pertumbuhan PMKS	6.00	%

	6	Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100.00	%
	7	Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate	10.00	%
	8	Persentase situs budaya yang dilestarikan	41.38	%
Sasaran strategis 11: Tertanganinya masalah	1	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	15	Perda
penegakan dan kepastian hukum di daerah	2	Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan	100.00	%
	3	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	14	kasus

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

a. Penetapan Kategori Nilai Capaian

Dalam pengukuran kinerja perlu dilakukan atribusi penilaian untuk memudahkan dalam penarikan simpulan. Dalam menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014 digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun ketidak-berhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Ternate kedepan.

b. Pengukuran Kinerja

1) Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2014

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2014 menggambarkan tingkat kinerja pencapaian sasaran strategis pada Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2014 pada formulir pengukuran kinerja terlampir, nilai capaian masingmasing indikator kinerja utama berkisar antara 21,11% sampai dengan 236,83%. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2014 adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	56.32	%	55.68	98.86
2	Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	100.00	%	90.00	90.00
3	Indeks Pembangunan Manusia	78.13	%	78.44	100.40
4	Nilai UN dan UAS rata-rata				
	- Nilai UN rata-rata SD	5.50		5.50	100.00
	- Nilai UAS rata-rata SD	7.50		7.50	100.00
	- Nilai UN rata-rata SLTP	5.50		5.50	100.00
	- Nilai UAS rata-rata SLTP	8.00		8.00	100.00
	- Nilai UN rata-rata SLTA	5.50		5.50	100.00
	- Nilai UAS rata-rata SLTA	8.00		8.00	100.00
	- Nilai UN rata-rata paket A	6.00		4.20	70.00
	- Nilai UAS rata-rata paket A	8.00		7.00	87.50
	- Nilai UN rata-rata paket B	6.00		4.22	70.33
	- Nilai UAS rata-rata paket B	8.00		6.10	76.25
	- Nilai UN rata-rata paket C	6.00		4.80	80.00
	- Nilai UAS rata-rata paket C	8.00		5.50	68.75
5	Angka putus sekolah				
	- SD	0.06		0.06	100.00
	- SLTP	0.08		0.07	112.50
	- SLTA	0.10		0.09	111.11
6	Angka partisipasi murni				
	- SD	98.00	%	97.31	99.30
	- SLTP	90.00	%	86.91	96.57
	- SLTA	91.00	%	82.62	90.79
7	Angka partisipasi kasar				
	- SD	103.00	%	105.79	102.71
	- SLTP	97.00	%	99.74	102.82
	- SLTA	92.00	%	94.73	102.97
8	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1:32		1:32	100.00
9	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1:32		1:34	97.83
10	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1:32		1:34	97.83
11	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1:20		1:12	110.00

10	D :	1 . 20		1 . 10	112.50
12	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1:20		1:10	112.50
13	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1:20		1:11	111.25
14 15	Angka usia harapan hidup Angka prevalensi penyakit	71	Tahun	69	97.18
13	- Malaria	< 1	‰	1.00	98.99
	- TBC	221/100.000	Pddk	231/100.00	95.48
	TBC		1 ddk	0	73.40
	- DBD	< 3	‰	2.30	123.08
	- HIV	0,1/1.000	Pddk	0,01/1.000	190.00
16	Angka kematian kasar	2 100 000	5.111		100.00
	- Karena penyakit Malaria	< 2 per 100.000	Pddk	< 2 per 100.000	100.00
	- Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000	Pddk	< 1,5 per 100.000	133.56
	- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000	Pddk	< 1,9 per 100.000	105.29
	- Karena penyakit HIV	<5 per 100.000	Pddk	1 per 100.000	100.00
17	Angka kesembuhan penderita TB paru BTA	89.00	%	52.40	58.88
18	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	3/1.000	KH	4,6/1.000	46.67
19	Angka kematian balita	3/1.000	KH	1,2/1.000	160.00
20	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	72/100.000	KH	63,5/100.00	111.81
21	Persentase balita gizi buruk	<0,2	%	0.90	21.11
22	Rasio pederita malaria terhadap jumlah penduduk	,			
	- Annual Malaria Incidence (AMI)	< 20	‰	19.00	105.21
	- Annual Parasite Incidence (API)	< 1	‰	1.00	99.00
23	Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan				
	- MCK Komunal	16.67	%	12.50	75.00
	- Drainase /gorong-gorong	14.79	%	12.17	82.30
	- Jalan lingkungan	7.34	%	17.02	231.88
24	Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	55.83	%	60.91	109.10
25	Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	35.00	%	37.58	107.37
26	Tingkat pengangguran terbuka	4.10	%	8.72	47.02
27	Pendapatan perkapita	3,359,400	Rp	7,623,797	226.94
28	Laju pertumbuhan ekonomi	8.35	%	7.60	91.02
29	Tingkat Inflasi	4.50	%	9.78	53.99
30	Rasio penduduk ber-KTP	1:0,8		1:0,62	77.50

31	Rasio penduduk ber-KK	1:0,8		1:0,62	77.50
32	Rasio bayi ber-akte kelahiran	1:0,6		1:0,6	100.00
33	Jumlah kelompok mas yarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	25	Klp.	25	100.00
34	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran	100.00	%	100.00	100.00
35	Menurunnya pertumbuhan PMKS	6.00	%	14.21	236.83
36	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	14	kasus	15	107.14

Pada tabel tersebut di atas menunjukan bahwa dari 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), 31 (tiga satu) mencapai hasil optimal ≥85,00% dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran nilai capainnya rendah, yaitu:

- 1. Angka kesembuhan penderita TB paru BTA, nilai capaian 58,88%.
- 2. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, nilai capaian 46,67%.
- 3. Persentase balita gizi buruk, nilai capaian 21,11%
- 4. Tingkat pengangguran terbuka, nilai capaian 47,02%.
- 5. Tingkat inflasi, nilai capaian 53,99%.

Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas, diuraikan pada Analisa Capaian Kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut menunjukan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Ternate tahun 2014.

2) Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014, dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2014 dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran (Formulir Pengukuran Kinerja terlampir) nilai capaian masingmasing indikator kinerja sasaran berkisar antara 21,11% sampai dengan 236,83% yang dapat dikelompokan sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja Indikator Sasaran	Predikat	Jumlah				
1	85 sampai dengan 100%	Sangat Berhasil	75				
2	70 s/d kurang dari 85%	Berhasil	3				
3	55 s/d kurang dari 70%	Cukup berhasil	1				
4	Kurang dari 55%	Tidak berhasil	4				
	Jumlah						

Tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar	1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	56.32 %	55.68 %	98.86
kawasan perkotaan secara berkeadilan	2	Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	100.00 %	90.00 %	90.00
	3	Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN	65.62 %	58.82 %	89.64
Sasaran Strategis 2:	1	Indeks Pembangunan Manusia	78.13 %	78.44 %	100.40
Meningkatnya derajat pendidikan masyaratakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah	2	Angka melek huruf seluruh penduduk	100.00 %	100.00 %	100.00
dan terjangkau sarana dan fasilitas yang	3	Nilai UN dan UAS rata-rata			
memadai, tenaga guru		Nilai UN ratarata SD	5.50	5.50	100.00
yang cukup dan mutu yang terus membaik		Nilai UAS ratarata SD	7.50	7.50	100.00
		Nilai UN ratarata SLTP	5.50	5.50	100.00
		Nilai UAS ratarata SLTP	8.00	8.00	100.00
		Nilai UN ratarata SLTA	5.50	5.50	100.00
		Nilai UAS ratarata SLTA	8.00	8.00	100.00
		Nilai UN ratarata	6.00	4.20	70.00
		paket A Nilai UAS ratarata	8.00	7.00	87.50
		paket A Nilai UN ratarata	6.00	4.22	70.33
		paket B Nilai UAS ratarata	8.00	6.10	76.25
		paket B Nilai UN ratarata	6.00	4.8	80.00
		paket C Nilai UAS ratarata paket C	8.00	5.50	68.75
	4	Angka kelulusan			
		SD	100.00 %	100.00 %	100.00
		SLTP	100.00 %	100.00 %	100.00
		SLTA	100.00 %	98.00 %	98.00
	5	Angka putus sekolah			
		SD	0.06	0.06	100.00

			T	1	
		SLTP	0.08	0.07	112.50
		SLTA	0.10	0.09	111.11
	6	Angka ratarata lama sekolah			
		SD	6 Thn	6 Thn	100.00
		SLTP	3 Thn	3 Thn	100.00
		SLTA	3 Thn	3 Thn	100.00
		SLIA	3 11111	3 11111	100.00
	7	Angka partisipasi murni			
		SD	98.00 %	97.31 %	99.30
		SLTP	90.00 %	86.91 %	96.57
		SLTA	91.00 %	82.62 %	90.79
	8	Angka partisipasi kasar			
		SD	103.00 %	105.79 %	102.71
		SLTP	97.00 %	99.74 %	102.82
		SLTA	92.00 %	94.73 %	102.97
	9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah			
		SD	1 : 192	1 : 203	95.63
		SLTP	1 : 672	1 : 133	173.63
		SLTA	1 : 735	1 : 286	156.48
	10	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1:32	1:32	100.00
	11	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1:32	1 : 34	97.83
	12	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1:32	1:34	97.83
	13	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1:20	1:12	110.00
	14	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1:20	1:10	112.50
	15	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1:20	1:11	111.25
Sasaran Strategis 3:	1	Angka usia harapan hidup	71 Thn	69 Thn	97.18
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Angka prevalensi penyakit	.4.07	4.00	00.00
		Malaria	< 1 %	1 %	98.99
		TBC	221/100.000 Pddk	231/100.000 Pddk	95.48
		DBD	< 3 ‰	2.3 ‰	123.08

	HIV	0,1/1.000 Pddk	0,01/1.000 Pddk	190.00
	3 Angka kematian			
	kasar Karena penyakit Malaria	< 2 per 100.000 Pddk	< 2 per 100.000 Pddk	100.00
	Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000 Pddk	< 1,5 per 100.000 Pddk	133.56
	Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000 Pddk	< 1,9 per 100.000 Pddk	105.29
	Karena penyakit HIV	<5 per 100.000 Pddk	1 per 100.000 Pddk	100.00
	Angka kesembuhan penderita TB paru BTA	89.00 %	52.40 %	58.88
Ę	5 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	3/1.000 KH	4,6/1.000 KH	46.67
•	6 Angka kematian balita	3/1.000 KH	1,2/1.000 KH	160.00
7	7 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	72/100.000 KH	63,5/100.000 KH	111.81
3	Persentase balita gizi buruk	<0,2 %	0.9 %	21.11
5	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	20 : 100.000 Pddk	15 : 100.000 Pddk	75.00
1	0 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	9 : 100.000 Pddk	8.1 : 100. Pddk	90.00
1	1 Rasio bidan per 100.000 penduduk	120 : 100.000 Pddk	128 : 100.000 Pddk	106.67
1	2 Rasio perawat per 100.000 penduduk	230 : 100.000 Pddk	205 : 100.000 Pddk	89.13
1	 Rasio Posyandu terhadap balita 	1 : 60	1 : 78	86.96
1	4 Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 20.000	1 : 20.000	100.00
1	5 Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 15.000	1 : 13.333	111.11
1	6 Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100.00 %	86.00 %	86.00
1	 Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam 	100.00 %	100.00 %	100.00
1	8 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100.00 %	100.00 %	100.00

	19	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	90.00 %	90.27 %	100.30
	20	Rasio pederita malaria terhadap jumlah penduduk	00.0	40.000	405.04
		Annual Malaria Incidence (AMI)	< 20 ‰	19.00 ‰	105.21
		Annual Parasite Incidence (API)	< 1 ‰	1.00 ‰	99.00
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang	1	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	46.29 %	46.32 %	100.06
proporsional dan Pro Rakyat	2	Rasio belanja modal terhadap total belanja	21.62 %	20.45 %	94.57
	3	Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100.00 %	100.00 %	100.00
	4	Persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP	100.00 %	100.00 %	100.00
	5	Persentase peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	100.00 %	100.00 %	100.00
	6	Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan			
		MCK Komunal	16.67 %	12.5 %	75.00
		Drainase /goronggorong	14.79 %	12.17 %	82.30
		Jalan lingkungan	7.34 %	17.02 %	231.88
	7	Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda	100.00 %	99.00 %	99.00
	8	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	30 KK	30 KK	100.00
Sasaran Strategis 5:	1	Jumlah lokasi di	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00
Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan		kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata			
dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	2	Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan	75.58 %	66.67 %	88.21
	3	Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	55.83 %	60.91 %	109.10

	4	Jumlah tempat pedagang kaki lima di pusat kota yang direlokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	100.00
Sasaran Strategis 6: Terwujudnya good government, dengan	1	Persentase PNS yang memperoleh penghargaan	7.12 %	7.66 %	107.58
sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan	2	Persentase PNS yang diberikan sanksi berat	0.50 %	0.08 %	184.00
kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	3	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00
	4	Ratarata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	35.00 %	37.58 %	107.37
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan	1	Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha	3 Klp.	3 Klp.	100.00
pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki	2	Nilai modal kerja dan investasi UKM	825,523,416,220.00 Rp	899,251,416,220.00 Rp	108.93
lima dan pedagang tradisional.	3	Nilai omzet UKM	1,772,293,538,270.00 Rp	2,327,137,548,272.00 Rp	131.31
ii ausioi iai.	4	Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	23 Klp.	23 Klp.	100.00
	5	Tingkat pengangguran terbuka	4.10 %	8.72 %	47.02
	6	Pendapatan perkapita	3,359,400 Rp	7,623,797 Rp	226.94
	7	Laju pertumbuhan ekonomi	8.35 %	7.60 %	91.02
	8	Tingkat Inflasi	4.50 %	9.78 %	53.99
Sasaran Strategis 8: Terwujudnya pelayanan publik yang cepat,	1	Jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	6 SKPD	6 SKPD	100.00
mudah, murah, nyaman dan berkualitas	2	Jumlah layanan perizinan bebas biaya	2 Jenis	2 Jenis	100.00
	3	Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai	10 Tempat	11 Tempat	110.00
	4	Rasio penduduk berKTP	1 : 0,8	1 : 0,62	77.50

	5	Rasio penduduk ber KK	1:0,8	1 : 0,62	77.50
	6	Rasio bayi berakte kelahiran	1:0,6	1 : 0,6	100.00
	7	Persentase ketersediaan armada sampah	60.47 %	62.5 %	103.37
Sasaran Strategis 9: Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	1	Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan	42 Klp.	42 Klp.	100.00
pesisii	2	Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan	4 Klp.	4 Klp.	100.00
	3	Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	25 Klp.	25 Klp.	100.00
Sasaran Strategis 10: Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran	1	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis AlQuran	100.00 %	100.00 %	100.00
spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya	2	Jumlah Taman Pengajian AlQuran yang dibina	147 TPQ	132 TPQ	89.80
budaya	3	Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	4 Kali	4 Kali	100.00
	4	Ratarata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan	40 Orang	35 Orang	87.50
	5	Menurunnya pertumbuhan PMKS	6.00 %	14.21 %	236.83
	6	Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100.00 %	99.08 %	99.08
	7	Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate	10.00 %	11.11 %	111.10
	8	Persentase situs budaya yang dilestarikan	41.38 %	40.74 %	98.46

Sasaran Strategis 11:	1	Jumlah Peraturan Daerah yang	15 Perda	15 Perda	100.00
Tertanganinya masalah penegakan dan		diterbitkan			
kepastian hukum di daerah	2	Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100.00
	3	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	14 Kasus	15 Kasus	107.14

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Formulir Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014, diketahui kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014 berada pada kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari 11 (sebelas) sasaran tahun 2014, semuanya mencapai hasil optimal ≥ 85%. 11 (sebelas) sasaran tersebut mempunyai indikator sasaran sebanyak 83. Hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran, menunjukan bahwa sebanyak 75 (90,37%) indikator sasaran mencapai nilai optimal ≥85,00% dan hanya 8 (9,64%) indikator kinerja sasaran yang nilai capaiannya kurang optimal <85,00%. Realisasi pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:

Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan

Pencapaian target sasaran 1 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%			
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	56,32 %	55,68 %	98,86			
2	Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	100,00 %	90,00 %	90,00			
3	Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik	65.62 %	58,82 %	89,64			
JUMLAH RATARATA							

Pada tabel tersebut di atas menunjukan bahwa tiga Indikator kinerja sasaran, yaitu: persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di

luar perkotaan, persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih, dan persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik mencapai hasil optimal ≥85,00%.

Sasaran 2:

Meningkatnya derajat pendidikan masyaratakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik

Pencapaian target sasaran 2 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR	GET	REALIS	ASI	%
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,13	%	78,44	%	100,40
2	Angka melek huruf seluruh penduduk	100,00	%	100,00	%	100,00
3	Nilai UN dan UAS RataRata					
	- Nilai UN Ratarata SD	5,50		5,50		100,00
	- Nilai UAS RataRata SD	7,50		7,50		100,00
	- Nilai UN Ratarata SLTP	5,50		5,50		100,00
	- Nilai UAS RataRata SLTP	8,00		8,00		100,00
	- Nilai UN Ratarata SLTA	5,50		5,50		100.00
	- Nilai UAS RataRata SLTA	8,00		8,00		100,00
	- Nilai UN RataRata Paket A	6,00		4,20		70,00
	- Nilai UAS RataRata Paket A	8,00		7,00		87,50
	- Nilai UN RataRata Paket B	6,00		4,22		70,33
	- Nilai UAS RataRata Paket B	8,00		6,10		76,25
	- Nilai UN RataRata Paket C	6,00		4,8		80,00
	- Nilai UAS RataRata Paket C	8,00		5,50		68,75
4	Angka Kelulusan					
	- SD	100,00	%	100,00	%	100,00
	- SLTP	100,00	%	100,00	%	100,00
	- SLTA	100,00	%	98,00	%	98,00
5	Angka putus sekolah					
	- SD	0,06	%	0,06	%	100,00
	- SLTP	0,08	%	0,07	%	112,50
6	- SLTA	0,10	%	0,09	%	111,11
	Angka ratarata lama sekolah - SD	e	Tahun	6	Tho	100.00
	- SLTP	6	Tahun	6	Thn	100,00 100,00
	- SLIF	3	ranun	3	Thn	100,00

	- SLTA	3	Tahun	3	Thn	100,00
7	Angka partisipasi murni					
	- SD	98,00	%	97,31	%	99,30
	- SLTP	90,00	%	86,91	%	96,57
	- SLTA	91,00	%	82,62	%	90,79
8	Angka partisipasi kasar					
	- SD	103,00	%	105,79	%	102,71
	- SLTP	97,00	%	99,74	%	102,82
	- SLTA	92,00	%	94,73	%	102,97
9	Rasio ketersediaan sekolah					
	terhadap penduduk usia					
	sekolah					
	- SD	1 : 192	%	1:203	%	95,63
	- SLTP	1 : 672	%	1:132	%	173,63
	- SLTA	1 : 735	%	1 : 286	%	156,48
10	Rasio jumlah RKB terhadap	1:32		1:32		100,00
	murid pada tingkat SD					
11	Rasio jumlah RKB terhadap	1:32		1:34		97,83
	murid pada tingkat SLTP					
12	Rasio jumlah RKB terhadap	1:32		1:34		97,83
	murid pada tingkat SLTA					
13	Rasio guru terhadap murid	1:20		1:12		110,00
	pada tingkat SD					
14	Rasio guru terhadap murid	1:20		1:10		112,50
	pada tingkat SLTP					
15	Rasio guru terhadap murid	1:20		1:11		111,25
	pada tingkat SLTA					
	JUMLAH RA	ATARATA				104,34

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran, sebanyak 15 (lima belas) indikator sasaran mencapai hasil optimal optimal ≥85,00%, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia, angka melek huruf seluruh penduduk, nilai UN dan UAS ratarata, angka kelulusan, angka putus sekolah, angka ratarata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD, rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP, rasio jumlah RKB terhadap pada tingkat SLTA, rasio guru terhadap murid pada tingkat SD, rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP dan rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA. Pada tabel tersebut diatas, juga terlihat bahwa terdapat indikator yang nilai capaiannya sangat tinggi ≥110,00%, yaitu:

- 1. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, nilai capaian ratarata 141,91%. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan adanya kekeliruan dalam penetapan target kinerja karena siswa SLTP pada awal tahun 2014 berjumlah 8.534 dan sekolah berjumlah 26 sehingga rasio yang sebenarnya adalah 1:328, tetapi yang ditetapkan pada penetapan kinerja 2014 adalah sebesar 1:672. Juga pada tingkat SLTA terjadi kekeliruan pada penetapan kinerja, jumlah siswa SMA dan SMK adalah 7.277 dengan jumlah sekolah 28 sehingga rasio yang sebenarnya adalah 1:256, tapi yang ditetapkan dalam penetapan kinerja 2014 adalah 1:735.
- 2. Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD nilai capaiannya 110,00% Tingginya nilai capaian tersebut karena adanya kelebihan guru pada jenjang SD. Kondisi ideal sesuai target rasio guru terhadap murid 1:20, kondisi riil 1:12. Jika berdasarkan jumlah siswa yang ada di Kota Ternate tahun 2014 yaitu sebanyak 20.025 siswa, maka jumlah guru yang dibutuhkan berdasarkan target rasio 1:20 adalah sebanyak 1.001, namun guru yang ada sebanyak 1.391 orang, berarti terjadi kelebihan guru sebanyak 390 orang. Kelebihan guru tersebut terkonsentrasi pada mata pelajaran Agama Islam dan guru kelas, namun juga terdapat guru mata pelajaran yang masih kurang sesuai kebutuhan. Kelebihan guru tersebut disebabkan adanya guru yang mutasi masuk dan juga guru titipan karena mengikuti suami yang bekerja di Kota Ternate.
- 3. Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP, nilai capaian 112,50%. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan terjadi kelebihan jumlah guru pada jenjang SLTP. Kondisi ideal sesuai target rasio guru terhadap murid 1:20, kondisi riil 1:10. Jika berdasarkan target rasio 1:20 dengan jumlah siswa yang ada di Kota Ternate tahun 2014 yaitu sebanyak 8.534 siswa, maka jumlah guru yang dibutuhkan sebanyak 427, namun guru yang ada sebanyak 929 orang, berarti terjadi kelebihan guru sebanyak 502 orang. Kelebihan guru tersebut terkonsentrasi pada beberapa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA Biologi, namun juga terdapat guru mata pelajaran yang masih kurang sesuai kebutuhan yaitu: IPS Sejarah, IPS Geografi, IPS Ekonomi, Seni Budaya, TIK, Mulok dan BP/BK. Kelebihan guru tersebut disebabkan adanya guru yang mutasi masuk dan juga guru titipan karena mengikuti suami yang bekerja di Kota Ternate
- 4. Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA nilai capaian 111,25%. Tingginya nilai capain tersebut disebabkan terjadi kelebihan jumlah guru. Kondisi ideal sesuai target rasio guru terhadap murid 1:20, kondisi riil 1:11. Jika berdasarkan target rasio 1:20 dengan jumlah siswa yang ada di Kota Ternate tahun 2014 yaitu sebanyak 8.459, maka jumlah guru yang dibutuhkan sebanyak 423, namun guru yang ada sebanyak

1.082 orang, berarti terjadi kelebihan guru sebanyak 659 orang. Kelebihan guru pada jenjang pendidikan SLTA, terkonsentrasi pada mata pelajaran: PKn, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika, Sejarah, Ekonomi, dan Bahasa Indonesia, sedangkan mata pelajaran yang kurang meliputi: Matematika, KKPI, IPA, IPS, Seni Budaya, Mulok, Kimia, Kewirausahaan dan BP/BK. Pada jenjang pendidikan SMK untuk mata pelajaran normatif dan adaptif, yaitu terdapat kelebihan pada mata pelajaran Agama Islam, agama Kristen, PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Biologi. Namun juga terdapat guru mata pelajaran yang masih kurang sesuai kebutuhan, yaitu mata pelajaran: Penjas, Matematika, KKPI, IPA, IPS, Seni Budaya, Mulok, Kimia, Kewirausahaan dan BP/BK. Untuk mata pelajaran Produktif terdapat kelebihan pada mata pelajaran: Teknik Audio Vidio, Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Akomodasi Perhotelan, Tata Boga/Patiseri, Tata Busana, Nautika Kapal Penangkap Ikan, Agribisnis Perikanan dan Nautika Kapal Niaga, namun terdapat kekurangan pada mata pelajaran: Multimedia, Teknik Survei dan Pemetaan, Teknik Kontruksi Kayu, Tata Kecantikan Rambut, Keperawatan, Teknik Kapal Niaga dan Teknik Komunikasi dan Jaringan. Kelebihan guru tersebut disebabkan adanya guru yang mutasi masuk dan juga guru titipan karena mengikuti suami yang bekerja di Kota Ternate.

Sasaran 3:
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Pencapaian target sasaran 3 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		%
1	Angka usia harapan hidup	71	Thn	69	Thn	97,18
2	Angka prevalensi penyakit					
	- Malaria	<1	‰	1	‰	98,99
	- TBC	221/100.000	Pddk	231/100.000	Pddk	95,48
	- DBD	3	‰	2,3	‰	123,08
	- HIV	0,1/1.000	Pddk	0,01/1.000	Pddk	190,00
3	Angka kematian kasar (per					
	1.000 penduduk)					
	- Karena penyakit Malaria	< 2 per 100.000		< 2 per 100.000		100,00
	- Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000		<1,5 per 100.000		133,56
	- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000		< 1,9 per 100.000		105,29
	- Karena penyakit HIV	< 5 per 100.000		1 per 100.000		100,00
4	Angka kesembuhan	89,00	%	52,40	%	58,88
	penderita TB paru BTA					
5	Angka kematian bayi per	3/1.000	KH	4,6/1.000	KH	46,67
	1.000 kelahiran hidup					

6	Angka kematian balita	3/1.000	KH	1,2/1.000	KH	160,00
7	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	72/100.000	KH	63,5/100.000	KH	111,81
8	Persentase gizi buruk pada balita	< 0,2	%	0,9	%	21,11
9	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	20:100.000 F	Pddk	15.1:100.000	Pddk	75,00
10	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	9:100.000 F	Pddk	8.1 : 100.000	Pddk	90,00
11	Rasio bidan per 100.000 penduduk	120 : 100.000 F	Pddk	128 : 100.000	Pddk	106,67
12	Rasio perawat per 100.000 penduduk	230 : 100.000 F	Pddk	205 : 100.000	Pddk	89,13
13	Rasio Posyandu terhadap balita	1 : 60		1 : 78		86,96
14	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1 : 20.000		1 : 20.000		100,00
15	Rasio pustu per satuan penduduk	1 : 15.000		1 : 13.333		111,11
16	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100,00 %	%	86,00	%	86,00
17	Persentase kelurahan terkena KLB yang di tangani < 24 jam	100,00 %	%	100,00	%	100,00
18	Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100,00 %	%	100,00	%	100,00
19	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	90,00 %	%	90,27	%	100,30
20	Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk:	00.00	0/	40.00	0/	405.04
	- Annual Malaria Incidence (AMI)	<29,00	‰	19,00	‰	105,21
	- Annual parasite incidence (API)	1,00	‰	1,00	‰	99,00
	JUMLA	H RATARATA				93,98

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran, sebanyak 16 (enam belas) indikator sasaran mencapai nilai optimal ≥85,00%, yaitu: angka usia harapan hidup, angka prevalensi penyakit Malaria, angka kematian kasar, angka kematian balita, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, rasio dokter gigi per 100.000 penduduk, rasio bidan per 100.000 penduduk, rasio perawat per

100.000 penduduk, rasio Posyandu terhadap balita, rasio Puskesmas per satuan penduduk, rasio Pustu per satuan penduduk, persentase Kecamatan bebas rawan gizi, persentase kelurahan terkena KLB yang di tangani < 24 jam, persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan, persentase persalinan oleh tenaga kesehatan dan rasio penderita Malaria terhadap jumlah penduduk (*Annual Malaria Incidence* dan *Annual parasite incidence*). Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat indikator sasaran yang nila capaiannya sangat tinggi ≥110,00%, yaitu :

- 1. Angka prevalensi penyakit nilai capaian 126,89%, tingginya nilai capaian tersebut karena optimalnya penanganan DBD dan HIV. Optimalnya capaian pada prevalensi penyakit DBD, karena telah meningkatkan sistem kewaspadaan dini, optimalnya kegiatan penyuluhan baik di luar gedung maupun di dalam gedung, meningkatkan koordinasi dalam pelaporan, meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang protap penanganan DBD, meningkatkan SKD dan PWS yang diikuti dengan upayaupaya pencegahan (instruksi SKD dari puskesmas ke kelurahan, distribusi abate, pemantauan jentik dan pencegahan penularan dengan melakukan kegiatan fooging/penyemprotan), meningkatkan pengawasan jentik dengan kegiatan abatesasi. Optimalnyanya penanganan HIV karena telah dilakukan upaya sosialisasi tentang HIVAIDS dan Napza pada kelompok remaja dan kelompok resiko tinggi, dilakukan konseling IMS dan HIVAIDS pada saat kegiatan mobile dan kunjungan ke sarana layanan, pengambilan sampel secret dan sampel darah yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan pada populasi kunci, pemeriksaan CD4 (sel dalam system kekebalan tubuh yang melawan infeksi), dilakukan monitoring efek samping obat (cara terbaik untuk mengetahui keberhasilan pengobatan dan efek yang timbul selama masa pengobatan), Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, pertemuan Internal layanan dalam membahas isu atau masalah yang ada pada layanan, supervise layanan. Kegiatankegiatan yang telah dilaksanakan tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, sumber daya dan anggaran (APBD dan GFATM) serta kerjasama dengan LSM dan Ormas Fatahayat NU sebagai kelompok penjangkau.
- 2. Angka kematian Balita nilai capaian 160.00%, tingginya nilai capaian tersebut disebabkan adanya upaya yang dilakukan antara lain:
 - a. Peningkatan penyuluhan kepada keluarga untuk lebih dini membawa anak ke
 Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan secara cepat.
 - b. Penyediaan sarana pendukung pelayanan balita.
 - Secara berkesinambungan melakukan penyuluhan tentang PHBS di tingkat keluarga.

- d. Melakukan Deteksi tumbuh kembang pada anak balita setiap 6 bulan di Posyandu dan pemberian Vitamin A pada balita.
- e. Penerapan MBTS secara optimal di Puskesmas.
- 3. Angka kematian ibu melahirkan nilai capaian 111.81%, tingginya nilai capaian tersebut karena adanya upaya yang dilakukan, meliputi:
 - a. Peningkatan pertolongan persalinan di fasilitasi kesehatan.
 - b. Deteksi dini oleh bidan bersama kader Posyandu dengan melakukan pelacakan kasus ibu hamil dengan faktor resiko maupun tanda bahaya pada ibu hamil dan segera dilakukan penanganan dengan instrument yang dipakai kartu pujirochiati.
 - c. Penyediaan rumah tunggu kelahiran bagi daerah terpencil yaitu moti, hiri dan batang dua, ibu hamil yang mengalami komplikasi didatangkan lebih awal sebelum jadwal persalinan di rumah tunggu (kurang lebih 1 minggu sebelum persalinan) sehingga kasus komplikasi dapat ditangani oleh dr spesialis.
 - d. Pembentukan kelas ibu hamil di setiap kelurahan sebagai upaya menjaring ibu hamil dengan penyampaian materi tentang kesehatan pada ibu hamil.
 - e. Pelayanan Ante natal atau pemeriksaan ibu hamil secara standar pada saat pemeriksaan ibu hamil baik di Puskesmas maupun Polindes.

Dari tabel tersebut diatas juga terlihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang nilai capaiannya rendah, yaitu:

- 1. Angka kesembuhan penderita TB paru (58,88), nilai capaian rendah disebabkan mobilisasi penderita yang tinggi, kurangnya kesadaran penderita memeriksa kembali pada akhir pengobatan (*follow up*) dan kurangnya kepatuhan penderita dalam berobat.
- 2. Angka kematian Bayi, nilai capaian 46,67%. rendahnya nilai capaian tersebut karena pada tahun 2014 kematian bayi masih tinggi yang disebabkan:
 - a. BBLR (berat badan lahir rendah)
 - b. Asfeksia pada bayi (kesulitan bernafas saat lahir)
 - c. Mengalami tetanus
 - d. Sepsis/infeksi
 - e. Kelainan kognital/cacat bawaan
 - f. Aspirasi (tersendak air susu)
 - g. Pneumonia
 - h. Diare
 - i. Malaria
- 3. Presentase balita gizi buruk 21,11%, rendahnya capaian disebabkan terjadinya peningkatan kasus gizi buruk yang disebabkan:
 - a. Adanya penyakit penyerta (TB, Broncopnemonia, Malaria, ISPA, Diare, Anemia)
 - b. Faktor ekonomi (masi kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga)
 - c. Pola Asuh
 - d. Mobilisasi

- e. Kegiatan Promoti belum berjalan maksimal
- 4. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk nilai capaian 75,00%, rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan:
 - Sarana pelayanan kesehatan yang tersedia di Kota Ternate belum memungkinkan di bukanya formasi penerimaan tenaga spesialis (Kota Ternate belum memiliki Rumah Sakit).
 - 2. Bertambahnya jumlah penduduk tidak diiringi dengan penambahan tenaga dokter spesialis.
 - 3. Adanya mutasi dokter spesialis ke Provinsi karena tidak tersedianya sarana pelayanan yang sesuai untuk dokter bersangkutan.

Sasaran 4: Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat

Pencapaian target sasaran 4 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARG	ET	REALISAS	SI %		
1	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	46,29	%	46,32 %	100,06		
2	Rasio belanja modal terhadap total belanja	21,62	%	20,45 %	94,57		
3	Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100,00	%	100,00 %	100,00		
4	Persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP	100,00	%	100,00 %	100,00		
5	Persentase Peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	100,00	%	100,00 %	100,00		
6	Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan:						
	- MCK Komunal	16,67	%	12,5 %	75,00		
	- Drainase /goronggorong	14,79	%	12,17 %	82,30		
	- Jalan lingkungan	7,34	%	17,02 %	231,88		
7	Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda	100,00	%	99,00 %	99,00		
8	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	30	KK	30 KI	100,00		
	JUMLAH RATARATA						

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa 8 (delapan) indikator sasaran, semuanya mencapai target optimal ≥85,00%, yaitu: rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, persentase realisasi dana partisipatif kecamatan, persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP, persentase peningkatan dana pembangunan kelurahan, persentase peningkatan infrastruktur lingkungan, persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda, dan jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah. Dari 8 (delapan) indikator sasaran yang mencapai hasil optimal tersebut, 1 (satu) indikator sasaran mencapai nilai 129,72%, yaitu Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan, tingginya nilai capaian tersebut karena adanya peningkatan alokasi dana dalam membiayai perbaikan infrastruktur lingkungan tahun 2014 pada pembangunan jalan lingkungan, sehingga volume pekerjaan meningkat.

Sasaran 5:

Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu

Pencapaian target sasaran 5 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah lokasi di kawasan	12 lokasi	12 lokasi	100,00
	pasar Gamalama dan			
	Tapak yang ditata			
2	Persentase taman kota di	75,58 %	66,67 %	88,21
	kawasan perkotaan yang			
	difungsikan			
3	Rasio ruang terbuka hijau	55,83 %	60,91 %	109,10
	(RTH) di kawasan			
	perkotaan			
4	Jumlah pedagang kaki lima	2 lokasi	2 lokasi	100,00
	di pusat kota yang			
	direlokasi			
	JUMLAH	I RATARATA		99,33

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa 4 (empat) indikator kinerja sasaran mencapai target ≥85,00%, yaitu: Jumlah lokasi di kawasan pasar Gamalama dan Tapak yang ditata, persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan, rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan, dan jumlah pedagang kaki lima di pusat kota yang direlokasi.

Sasaran 6:

Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat

Pencapaian target sasaran 6 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase PNS yang	7,12 %	7,66 %	107,58	
	memperoleh penghargaan				
2	Persentase PNS yang	0,50 %	0,08 %	184,00	
	diberikan sanksi berat				
3	Persentase kenaikan	100,00 %	100 %	100,00	
	pangkat PNS tepat waktu				
4	Ratarata penyelesaian	35,00 %	37,58 %	107,37	
	rekomendasi hasil				
	pemeriksaan APIP dan				
	BPK				
JUMLAH RATARATA					

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, sebanyak 4 (empat) indikator sasaran mencapai hasil optimal ≥85,00%, yaitu: persentase PNS yang memperoleh penghargaan, Persentase PNS yang diberikan sanksi berat, persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu, dan ratarata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK. Dari indiktor tersebut diatas, indiktor persentase PNS yang diberikan sanksi berat nilai capaiannya 184,00%. Tingginya nilai capaian tersebut sebabkan telah berjalannya pembinaan disiplin secara berjenjang pada satuan/unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Ternate, juga telah dilaksanakan pemberian sanksi ringan dan sedang terhadap PNS yang melanggar disiplin sehingga sebagian besar PNS yang diberikan sanksi tersebut tidak lagi melakukan pelanggaran disiplin berat.

Sasaran 7:

Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional

Pencapaian target sasaran 7 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%		
1	Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha	3 Klp.	3 Klp.	100,00		
2	Nilai modal kerja dan investasi UKM	825.523.416.220,00 Rp	899.251.416.220,00 Rp	108,93		
3	Nilai Omzet UMKM	1.772.293.538.270 Rp	2.327.137,548.272 Rp	131,31		
4	Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	23 Klp.	23 Klp.	100,00		
5	Tingkat penganguran terbuka	4,10 %	8.72 %	47,02		
6	Pendapatan perkapita	3.359.400 Rp	7.623.797 Rp	226,94		
7	Laju pertumbuhan ekonomi	8,35 %	7,60 %	91,02		
8	Tingkat Inflasi	4,50 %	9,78 %	53,99		
	JUMLAH RATARATA					

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran, 6 (enam) indikator sasaran mencapai hasil optimal di atas ≥85,00%, yaitu: Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha, nilai modal kerja dan investasi UKM, nilai Omzet UMKM, jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan, pendapatan perkapita, dan laju pertumbuhan ekonomi. Pada indikator tersebut di atas terdapat 2 (dua) indikator yang nilai capainnya sangat tinggi, yaitu:

- Nilai Omzet UMKM, nilai capaian 131,31%, tingginya nilai capaian tersebut tersebut disebabkan adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dimana pada tahun 2014 ekonomi Kota Ternate tumbuh sebesar 7,60%, pertumbuhan ekonomi tersebut ikut berpengaruh pada pertumbuhan omzet UMKM.
- 2. Pendapatan perkapita nilai capaian 226,94%, tingginya nilai capaian tersebut disebabkan adanya pertumbuhan ekonomi pada sektorsektor ekonomi yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat.

Pada tabel tersebut di atas, terlihat 2 (dua) indikator sasaran yang nilai capaiannya rendah, yaitu:

- 1. Tingkat pengangguran terbuka nilai capaian 47.02%, hal tersebut disebabkan berlakunya UndangUndang Nomor 4 tahun 2009 pada tanggal 12 Januari 2014 tentang mineral dan batubara berupa pelarangan export mineral mentah sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besarbesaran pada perusahan tambang di Maluku Utara. Sebagai pusat perekonomian di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate menjadi tempat tujuan utama para mantan karyawan tersebut untuk mencari kerja dan juga karena sebagian pekerja pada perusahan tambang tersebut adalah penduduk Kota Ternate.
- 2. Tingkat Inflasi, nilai capaian 56,03%, rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan adanya peralihan musim yang menyebakan tingginya gelombang diperairan Maluku Utara yang mempengaruhi laju distribusi serta kapasitas produksi sektor perikanan dan juga faktor komoditas yang berasal dari kelompok komoditas bergejolak (volatile foods) yang merupakan komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktorfaktor tertentu.

Sasaran 8: Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas

Pencapaian target sasaran 8 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARG	ET	REALI	SASI	%
1	Jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	6	SKPD	6	SKPD	100.00
2	Jumlah layanan perizinan bebas biaya	2	Jenis	2	Jenis	100,00
3	Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai	10	Tempat	11	Tempat	110,00
4	Rasio penduduk berKTP	1:0,8		1:0,62		77,50
5	Rasio penduduk berKK	1 : 0,8		1:0,62		77,50
6	Rasio bayi ber–akte kelahiran	1 : 0,6		1 : 0,6		100,00
7	Persentase ketersediaan armada sampah	60,47	%	62,5	%	103,37
	JUMLA	H RATARA	λTA			95,48

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa dari 7 (tujuh) indikator sasaran, sebanyak 5 (lima) Indikator sasaran mencapai hasil optimal di atas ≥85,00%, yaitu: jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP, jumlah layanan perizinan bebas biaya, jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai, Rasio Bayi berakte kelahiran dan persentase ketersediaan armada sampah. Pada tabel tersebut terlihat 1 (indikator) sasaran yang nilai capaiannya sangat tinggi yaitu Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana yang memadai dengan nilai capaian 110,00%. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan adanya komitmen dari Walikota Ternate untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga pada tahun 2014 dialokasi anggaran yang cukup untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik yang representatif. Namun demikian, masih terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang nilainya rendah yaitu:

- 1. Rasio penduduk berKTP nilai capaian 77,50%, rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah untuk melakukan perekaman data. Tingkat kesadaran juga sangat dipengaruhi oleh asumsi tentang kebutuhan akan data kependudukan yang akurat. Masih banyak penduduk wajib KTP yang belum dilakukan perekaman data karena datanya masih salah dan mereka enggan melakukan perubahan terhadap data (KKnya) terlebih dahulu.
- 2. Rasio penduduk berKK nilai capaian 77,50%, disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat yang telah berkeluarga untuk memiliki kartu keluarga sendiri dan juga sebagian anggota masyarakat yang telah berkeluarga belum ingin memisahkan diri karena masih tinggal serumah orang tuanya, sehingga mereka masih tercatat sebagai anggota keluarga pada kartu keluarga orang tuanya. Juga belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya memiliki kartu keluarga.

Sasaran 9: Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir

Pencapaian target sasaran 9 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah kelompok	42 Klp.	42 Klp.	100,00
	nelayan tangkap yang			
	memperoleh bantuan			
2	Jumlah kelompok	4 Klp.	4 Klp.	100,00
	nelayan budidaya yang			
	memperoleh bantuan			
3	Jumlah kelompok	25 Klp.	25 Klp.	100,00
	masyarakat kawasan			
	pesisir yang telah			
	mengolah hasil			
	perikanan			
	JUML	AH RATARATA		100,00

Pencapaian kinerja pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa 3 (tiga) indikator sasaran semuanya mecapai hasil optimal di atas ≥85,00%, yaitu: jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan, Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan dan Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan.

Sasaran 10:

Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya

Pencapaian target sasaran 10 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR	GET	REALIS	ASI	%
1	Persentase siswa SD kelas	100,00	%	100,00	%	100,00
	VI beragama islam dapat baca tulis AlQuran					
2	Jumlah taman pengajian AlQuran	147	TPQ	132	TPQ	89,80
3	Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	4	Kali	4	Kali	100,00
4	Ratarata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan	40	Orang	35	Orang	87,50
5	Menurunnya pertumbuhan PMKS	6,00	%	14,21	%	236,83
6	Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100,00	%	99,08	%	99,08
7	Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate	10,00	%	11,11	%	111,10
8	Persentase situs budaya yang dilestarikan	41,38	%	40,74	%	98,46
	JUMLA	H RATARA	ΛTA			115,35

Dari tabel tersebut menunjukan bahwa 8 (delapan) indikator sasaran semuanya mencapai nilai optimal ≥85,00%, yaitu: persentase siswa SD kelas VI beragama islam dapat baca tulis AlQuran, jumlah taman pengajian AlQuran yang dibina, jumlah pertemuan forum antar umat beragama, ratarata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan, menurunnya pertumbuhan PMKS, persentase sekolah dasar yang telah

mengajar bahasa daerah Ternate, persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate, dan persentase situs budaya yang dilestarikan. Pada indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang nilai capaiannya sangat tinggi, yaitu:

- 1. Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran budaya Ternate nilai capaian 111,10%, hal tersebut disebabkan tingginya minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan seni budaya daerah Kota Ternate;
- Menurunnya pertumbuhan PMKS nilai capaian 236,83%. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk membantu PMKS, pada tahun 2014 terjadi pebaikan rumah layak huni oleh pemerintah daerah sebanyak 457 rumah.

Sasaran 11: Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah

Pencapaian target sasaran 11 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TAR	GET	REALIS	SASI	%
1	Jumlah Peraturan Daerah	15	Perda	15	Perda	100,00
	baru yang diterbitkan					
2	Persentase permasalahan	100,00	%	100,00	%	100,00
	hukum Pemerintah Kota					
	Ternate yang dapat					
	diselesaikan					
3	Jumlah kasus pelanggaran	14	Kasus	15	Kasus	107.14
	Perda yang dapat ditangani					
JUM	JUMLAH RATARATA					

Pada tabel tersebut terlihat bahwa 3 (tiga) indikator kinerja sasaran telah mencapai hasil optimal ≥85,00%, yaitu: jumlah Peraturan Daerah baru yang diterbitkan, persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan, dan jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani.

C. ANALISA TREND CAPAIAN KINERJA

Analisa *trend* capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 adalah sebagi berikut :

		CAP	AIAN	
NO	SASARAN	TAHUN 2013	TAHUN 2014	KENAIKAN / PENURUNAN
1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	100,70%	92,83%	(7,87%)
2	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	105,39%	104,34%	(1,05%)
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	190,61%	93,98%	(96,63%)
4	Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	232,17%	102,92%	(129,25%)
5	Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	97,51%	99,33%	1,82%
6	Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	118,01%	124,74%	6,73%
7	Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.	99,36%	107,40%	8.04%
8	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	101,25%	95,48%	(5,77%)

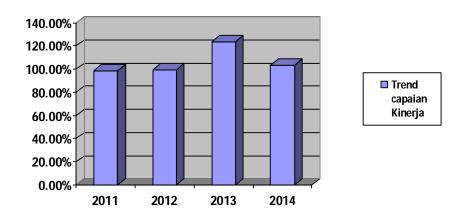
9	Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	94,97%	100,00%	5.03%
10	Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya	122,06%	115,35%	(6,71%)
11	Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	97,78%	102,38%	4,60%
	JUMLAH RATARATA	123,62%	103,53%	(20,09%)

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran tahun 2014 dibanding tahun 2013 yaitu dari 11 (sebelas) sasaran yang ditetapkan, sebanyak 5 (lima) sasaran mengalami kenaikan dan 6 (enam) sasaran mengalami penurunan. 5 (lima) sasaran yang mengalami kenaikan tersebut adalah:

- 1. Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu dengan nilai capaian 99,33%, tahun 2013 nilai capaian 97,51%, terjadi kenaikan sebesar 1,82%;
- 2. Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat dengan nilai capaian 124,74%, capaian tahun 2013 sebesar 118,01%, terjadi kenaikan sebesar 6,73%;
- Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional dengan nilai capaian 107,40%, tahun 2013 nilai capaian 99,36%, terjadi kenaikan sebesar 8,04%;
- 4. Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir, nilai capaian 100,00%, tahun 2013 nilai capaian 94,97%, terjadi kenaikan sebesar 5,03%.
- 5. Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah dengan nilai capaian 102.38%, tahun 2013 nilai capaian 97,78%, terjadi kenaikan sebesar 4,60%.
- 6 (enam) sasaran tahun 2014 yang mengalami penurunan adalah:
- Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan dengan nilai capaian 92,83%, capaian tahun 2013 sebesar 100,70%, terjadi penurunan sebesar 7,87%;

- Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik dengan nilai capaian 104,34%, tahun 2013 nilai capaian 105,39% terjadi penurunan sebesar 1,05%;
- 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan nilai capaian 93,98%, capaian tahun 2013 sebesar 190,61%, terjadi penurunan sebesar 96,63%;
- 4. Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat dengan nilai capaian 102,92%, capaian tahun 2013 sebesar 232,17%, terjadi penurunan 129,25%;
- 5. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas dengan nilai capaian 95,48%, tahun 2013 sebesar 101,25%, terjadi penurunan sebesar 5,77%;
- 6. Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya dengan nilai capaian 115,35%, tahun 2013 nilai capaian sebesar 122,06%, terjadi penurunan sebesar 6,71%;





Dari grafik tersebut di atas, terlihat bahwa capaian kinerja sejak tahun 2011 s/d 2014 fluktuatif, pada tahun 2011, nilai capaian 98,60%, tahun 2012 nilai capaian 99,12% atau terjadi kenaikan sebesar 0,52% dari tahun 2011, tahun 2013 nilai capaian 123,62% atau terjadi kenaikan sebesar 24,50% dari tahun 2012, capaian tahun 2014 sebesar 103,53% atau terjadi penurunan sebesar 20,09% dari tahun sebelumnya.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Garis besar APBD Kota Ternate tahun 2014 dan realisasinya adalah sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA	%
1	2	3	4 = 2-3	5
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	54.493.884.000,00	57.488.803.335,94	2.994.919.335,94	105,50
Pendapatan Pajak Daerah	25.400.000.000,00	31.160.603.565,00	5.760.603.565,00	122,68
Pendapatan Retribusi Daerah	18.446.000.000,00	14.789.487.140,50	(3.656.512.859,50)	80,18
Hasi pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan	500.000.000,00	765.132.728,00	265.132.728,00	153,02
Lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah	10.147.884.000,00	10.773.579.902,44	625.695.902,44	106,16
PENDAPATAN TRANSFER	630.640.109.000,00	641.592.436.975,00	10.952.327.975,00	101,74
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	34.472.000.000,00	45.424.327.975,00	10.952.327.975,00	131,77
Dana Alokasi Umum	536.443.879.000,00	536.443.879.000,00		100,00
Dana Alokasi Khusus	59.724.230.000,00	59.724.230.000,00		100,00
LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	69.610.000.000,00	73.604.462.163,00	3.994.462.163,00	105,74
Hibah	260.000.000,00		(260.000.000,00)	
Dana Darurat				
Dana Bagi Hsl Pajak Provinsi & Pemda lainnya	8.850.000.000,00	9.243.498.063,00	393.498.063,00	104,44
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.500.000.000,00	64.309.914.000,00	3.809.914.000,00	106,30
Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemda Lainnya				
Pendapatan lainnya		51.050.100,00	51.050.100,00	
Jumlah Pendapatan	754.743.993.000,00	772.685.702.473,94	17.941.709.473,94	102,38
BELANJA DAERAH				
BELANJA TIDAK LANGSUNG	421.277.318.551,00	392.232.921.336,00	(29.044.397.215,00)	93,10
Belanja Pegawai	400.388.318.551,00	371.948.003.366,00	28.440.315.185,00	92,90
Belanja Hibah	5.350.000.000,00	5.300.000.000,00	(50.000.000,00)	99,06
Belanja Bantuan Sosial	5.000.500.000,00	4.799.967.700,00	(200.532.300,00)	95,99
Belanja Bagi Hasi Kpd Prov/kab/Kota dan Desa				
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/kab/kota dan Des	538.500.000,00	498.370.270,00	(40.129.730,00)	92, 55
Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	9.686.580.000,00	(313.420.000,00)	96,86
LainLain				
BELANJA LANGSUNG	363.637.527.449,00	338.428.828.394,24	(25.208.699.054,76)	93,07
Belanja Pegawai	58.747.000.200,00	55.442.192.082,00	(3.304.808.118,00)	94,37
Belanja Barang dan Jasa	142.678.968.710,00	133.797.205.425,00	(8.881.763.285,00)	93,77

Belanja Modal	162.211.558.539,00	149.189.430.887,24	(13.022.127.651,76)	91,97
Jumlah Belanja	784.914.846.000,00	730.661.749.730,24	(54.253.096.269,76)	93,09
Surplus / (Defisit)	(1.539.658.839.000,00)	(1.503.347.452.204,18)	36.311.386.795,82	
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya		(17.822.064.283,00)	(17.822.064.283,00)	
Pencairan Dana Cadangan				
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan				
Penerimaan Pinjaman Daera dan Obligasi Daerah	36.520.853.000,00		(36.520.853.000,00)	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
Penerimaan Piutang Daerah				
Jumlah Penerimaan	36.520.853.000,00	(17.822.064.283,00)	(54.342.917.283,00)	
Pembiayaan PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
Pembentukan Dana Cadangan				
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.350.000.000,00	5.750.000.000,00	(600.000.000,00)	90,55
Pembayaran Pokok Hutang				
Pemberian Pinjaman Daerah				
Jumlah Pengeluran Pembiayaan	6.350.000.000,00	5.750.000.000,00	(600.000.000,00)	90,55
Pembiayaan Netto	30.170.853.000,00	(23.572.064.283,00)	(53.742.917.283,00)	(78,13)
SILPA Tahun Berkenaan		18.451.888.460,70	18.451.888.460,70	

Realisasi APBD Kota Ternate tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Anggaran Pendapatan terealisir sebesar 102,36%
- Anggaran Belanja terealisir sebesar 93,09%

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun sesuai evaluasi hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal, diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014 berada pada katagori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata capaian kinerja indikator sasaran tahun 2014 yaitu **sebesar 103,53%.** Dari 11 (sebelas) sasaran pada penetapan kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014, semuanya mencapai hasil optimal ≥ 85%. Jumlah indikator kinerja sasaran tahun 2014 sebanyak 83 indikator, 75 (tujuh puluh lima) indikator sasaran (90,37%) mencapai nilai optimal ≥85,00% dan hanya 8 (delapan) indikator sasaran (9,64%) yang nilai capaiannya kurang optimal <85,00%.yaitu:

- Angka kesembuhan penderita TB paru nilai capaian 58,88%, nilai capaian rendah disebabkan mobilisasi penderita yang tinggi, kurangnya kesadaran penderita memeriksa kembali pada akhir pengobatan (*follow up*) dan kurangnya kepatuhan penderita dalam berobat.
- 2. Angka kematian Bayi, nilai capaian 46,67%, rendahnya nilai capaian tersebut karena pada tahun 2014 kematian bayi masih tinggi yang disebabkan:
 - a. BBLR (berat badan lahir rendah)
 - b. Asfeksia pada bayi (kesulitan bernafas saat lahir)
 - c. Mengalami tetanus
 - d. Sepsis/infeksi
 - e. Kelainan kognital/cacat bawaan
 - f. Aspirasi (tersendak air susu)
 - g. Pneumonia
 - h. Diare
 - i. Malaria
- 3. Presentase balita gizi buruk nilai capaian 21,11%, rendahnya capaian disebabkan terjadinya peningkatan kasus gizi buruk yang disebabkan:
 - a. Adanya penyakit penyerta (TB, Broncopnemonia, Malaria, ISPA, Diare, Anemia)
 - b. Faktor ekonomi (masih kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga)
 - c. Pola Asuh

- d. Mobilisasi
- e. Kegiatan Promosi belum berjalan maksimal
- 4. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk nilai capaian 75,00%, rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan:
 - 1. Sarana pelayanan kesehatan yang tersedia di Kota Ternate belum memungkinkan di bukanya formasi penerimaan tenaga spesialis (Kota Ternate belum memiliki Rumah Sakit).
 - 2. Bertambahnya jumlah penduduk tidak diiringi dengan penambahan tenaga dokter spesialis.
 - 3. Adanya mutasi dokter spesialis ke Provinsi karena tidak tersedianya sarana pelayanan yang sesuai untuk dokter bersangkutan.
- 5. Tingkat pengangguran terbuka nilai capaian 47.02%, hal tersebut disebabkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pada tanggal 12 Januari 2014 tentang mineral dan batubara berupa pelarangan export mineral mentah sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran pada perusahaan tambang di Maluku Utara. Sebagai pusat perekonomian di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate menjadi tempat tujuan utama para mantan karyawan tersebut untuk mencari kerja dan juga karena sebagian pekerja pada perusahaan tambang tersebut adalah penduduk Kota Ternate.
- 6. Tingkat Inflasi, nilai capaian 56,03%. Target kinerja inflasi tahun 2014 sebesar 4,50% realisasi 9,78%, rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan adanya peralihan musim yang menyebakan tingginya gelombang diperairan Maluku Utara yang mempengaruhi laju distribusi serta kapasitas produksi sektor perikanan dan juga faktor komoditas yang berasal dari kelompok komoditas bergejolak (volatile foods) yang merupakan komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak kerena faktor-faktor tertentu
- 7. Rasio penduduk ber-KTP nilai capaian 77,50%, rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah untuk melakukan perekaman data. Tingkat kesadaran juga sangat dipengaruhi oleh asumsi tentang kebutuhan akan data kependudukan yang akurat. Masih banyak penduduk wajib KTP yang belum dilakukan perekaman data karena datanya masih salah dan mereka enggan melakukan perubahan terhadap data (KK-nya) terlebih dahulu.

8. Rasio penduduk ber-KK nilai capaian 77,50%, disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat yang telah berkeluarga untuk memiliki kartu keluarga sendiri dan juga sebagian anggota masyarakat yang telah berkeluarga belum ingin memisahkan diri karena masih tinggal serumah orang tuanya, sehingga mereka masih tercatat sebagai anggota keluarga pada kartu keluarga orang tuanya. Juga belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya memiliki kartu keluarga.

Kelemahan tersebut di atas, diprioritaskan untuk segera dibenahi dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya.

Dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai maupun kekurangan/kelemahan sebagaimana tergambar dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2014, maka hal tersebut akan dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Ternate kedepan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance*.

L A M P I R A N PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara	 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan 	56.32 %	55.68 %	98.86
berkeadilan	Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	100.00 %	90.00 %	90.00
	3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN	65.62 %	58.82 %	89.64
2 Meningkatnya derajat pendidikan	1 Indeks Pembangunan Manusia	78.13 %	78.44 %	100.40
masyaratakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan	2 Angka melek huruf seluruh penduduk	100.00	100.00	100.00
terjangkau sarana dan fasilitas yang	3 Nilai UN dan UAS rata-rata			
memadai, tenaga guru yang cukup	- Nilai UN rata-rata SD	5.50	5.50	100.00
dan mutu yang terus membaik	- Nilai UAS rata-rata SD	7.50	7.50	100.00
	- Nilai UN rata-rata SLTP	5.50	5.50	100.00
	- Nilai UAS rata-rata SLTP	8.00	8.00	100.00
	- Nilai UN rata-rata SLTA	5.50	5.50	100.00
	- Nilai UAS rata-rata SLTA	8.00	8.00	100.00
	- Nilai UN rata-rata paket A	6.00	4.20	70.00
	- Nilai UAS rata-rata paket A	8.00	7.00	87.50
	- Nilai UN rata-rata paket B	6.00	4.22	70.33
	- Nilai UAS rata-rata paket B	8.00	6.10	76.25
	- Nilai UN rata-rata paket C	6.00 8.00	4.8 5.50	80.00 68.75
	- Nilai UAS rata-rata paket C	0.00	3.30	06.73

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		%
	4 Angka kelulusan					
	- SD	100.00		100.00		100.00
	- SLTP	100.00	%	100.00	%	100.00
	- SLTA	100.00	%	98.00	%	98.00
	5 Angka putus sekolah					
	- SD	0.06		0.06		100.00
	- SLTP	0.08		0.07		112.50
	- SLTA	0.10		0.09		111.11
	6 Angka rata-rata lama sekolah					
	- SD		Tahun		Tahun	100.00
	- SLTP		Tahun		Tahun	100.00
	- SLTA	3	Tahun	3	Tahun	100.00
	7 Angka partisipasi murni					
	- SD	98.00		97.31		99.30
	- SLTP	90.00		86.91		96.57
	- SLTA	91.00	%	82.62	%	90.79
	8 Angka partisipasi kasar					
	- SD	103.00		105.79		102.71
	- SLTP	97.00	%	99.74		102.82
	- SLTA	92.00	%	94.73	%	102.97
	9 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah					
	- SD	1:192		1:203		95.63
	- SLTP	1:672		1:133		173.63
	- SLTA	1:735		1:286		156.48
	10 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1:32		1:32		100.00
	11 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1:32		1:34		97.83
	12 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1:32		1:34		97.83
	13 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1:20		1:12		110.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	14 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1:20	1:10	112.50
	15 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1:20	1:11	111.25
3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup Angka prevalensi penyakit	71 Tahun	69 Tahun	97.18
	- Malaria	< 1 ‰	1 ‰	98.99
	- TBC	221/100.000 Pddk	231/100.000 Pddk	95.48
	- DBD	< 3 ‰	2.3 ‰	123.08
	- HIV	0,1/1.000 Pddk	0,01/1.000 Pddk	190.00
	3 Angka kematian kasar			
	- Karena penyakit Malaria	< 2 per 100.000 Pddk	< 2 per 100.000 Pddk	100.00
	- Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000 Pddk	< 1,5 per 100.000 Pddk	133.56
	- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000 Pddk	< 1,9 per 100.000 Pddk	105.29
	- Karena penyakit HIV	<5 per 100.000 Pddk	1 per 100.000 Pddk	100.00
	4 Angka kesembuhan penderita TB paru	89.00 %	52.40 %	58.88
	5 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	3/1.000 KH	4,6/1.000 KH	46.67
	6 Angka kematian balita	3/1.000 KH	1,2/1.000 KH	160.00
	7 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	72/100.000 KH	63,5/100.000 KH	111.81
	8 Persentase balita gizi buruk	<0,2 %	0.9 %	21.11
	9 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	20 : 100.000 Pddk	15 : 100.000 Pddk	75.00
	10 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	9 : 100.000 Pddk	8.1 : 100.000 Pddk	90.00
	11 Rasio bidan per 100.000 penduduk	120 : 100.000 Pddk	128 : 100.000 Pddk	106.67
	12 Rasio perawat per 100.000 penduduk	230 : 100.000 Pddk	205 : 100.000 Pddk	89.13
	13 Rasio Posyandu terhadap balita	1:60	1:78	86.96
	14 Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:20.000	1:20.000	100.00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	15 Rasio Pustu per satuan penduduk	1:15.000	1:13.333	111.11
	16 Persentase kecamatan bebas rawan	100 %	86.00 %	86.00
	gizi			
	17 Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam	100.00 %	100.00 %	100.00
	18 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100.00 %	100.00 %	100.00
	19 Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	90.00 %	90.27 %	100.30
	20 Rasio pederita malaria terhadap jumlah penduduk			
	- Annual Malaria Incidence (AMI)	< 20 %	19.00 ‰	105.21
	- Annual Parasite Incidence (API)	< 1 ‰	1.00 ‰	99.00
4 Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	46.29 %	46.32 %	100.06
Rakyat	 Rasio belanja modal terhadap total belanja 	21.62 %	20.45 %	94.57
	3 Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100.00 %	100.00 %	100.00
	4 Persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP	100.00 %	100.00 %	100.00
	5 Persentase peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	100.00 %	100.00 %	100.00
	6 Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan			
	- MCK Komunal	16.67 %	12.5 %	75.00
	- Drainase /gorong-gorong	14.79 %	12.17 %	82.30
	- Jalan lingkungan	7.34 %	17.02 %	231.88
	7 Persentase pemberian bantuan	100.00 %	99.00 %	99.00
	pembinaan bagi generasi muda			
	8 Jumlah masyarakat miskin yang	30 KK	30 KK	100.00
	mendapat bantuan sertifikat tanah			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5 Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan	Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata	12 lokasi	12 lokasi	100.00
dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan	75.58 %	66.67 %	88.21
	3 Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	55.83 %	60.91 %	109.10
	4 Jumlah tempat pedagang kaki lima di pusat kota yang direlokasi	2 lokasi	2 lokasi	100.00
6 Terwujudnya <i>good government</i> , dengan sumber daya aparatur yang	1 Persentase PNS yang memperoleh penghargaan	7.12 %	7.66 %	107.58
profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan	2 Persentase PNS yang diberikan sanksi berat	0.50 %	0.08 %	184.00
kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	3 Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100.00 %	100 %	100.00
	4 Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	35.00 %	37.58 %	107.37
7 Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh	Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha	3 Klp.	3 Klp.	100.00
dan pekerja, koperasi, usaha mikro	2 Nilai modal kerja dan investasi UKM	825,523,416,220.00 Rp	899,251,416,220.00 Rp	108.93
kecil menengah (UMKM), pedagang	3 Nilai omzet UKM	1,772,293,538,270.00 Rp	2,327,137,548,272.00 Rp	131.31
kaki lima dan pedagang tradisional.	4 Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	23 Klp.	23 Klp.	100.00
	5 Tingkat pengangguran terbuka	4.10 %	8.72 %	47.02
	6 Pendapatan perkapita	3,359,400 Rp	7,623,797 Rp	226.94
	7 Laju pertumbuhan ekonomi	8.35 %	7.60 %	91.02
	8 Tingkat Inflasi	4.50 %	9.78 %	53.99

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
8 Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan	Jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	6 SKPD	6 SKPD	100.00
berkualitas	2 Jumlah layanan perizinan bebas biaya	2 jenis	2 jenis	100.00
	3 Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai	10 Tempat	11 Tempat	110.00
	4 Rasio penduduk ber-KTP	1:0,8	1:0,62	77.50
	5 Rasio penduduk ber-KK	1:0,8	1:0,62	77.50
	6 Rasio bayi ber-akte kelahiran	1:0,6	1:0,6	100.00
	7 Persentase ketersediaan armada sampah	60.47 %	62.5 %	103.37
Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan	42 Klp.	42 Klp.	100.00
	Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan	4 Klp.	4 Klp.	100.00
	3 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	25 Klp.	25 Klp.	100.00
10 Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial,	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al- Quran	100.00 %	100.00 %	100.00
dan budaya	Jumlah Taman Pengajian Al-Quran yang dibina	147 TPQ	132 TPQ	89.80
	Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	4 Kali	4 Kali	100.00
	4 Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan	40 Orang	35 Orang	87.50
	5 Menurunnya pertumbuhan PMKS	6.00 %	14.21 %	236.83
	6 Persentase sekolah dasar yang telah	100.00 %	99.08 %	99.08
	mengajarkan bahasa daerah Ternate			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	7 Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate	10.00 %	11.11 %	111.10
	8 Persentase situs budaya yang dilestarikan	41.38 %	40.74 %	98.46
11 Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	15 Perda	15 Perda	100.00
	Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan	100 %	100 %	100.00
	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	14 kasus	15 kasus	107.14

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2014 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014 191,619,112,836.00 179,034,398,793.00

LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pemerintah Kota Ternate Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan Persentase kelurahan pada kawasan 	56.32 % 100.00 %
Deriverdander	dataran tinggi yang terlayani air bersih 3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN	65.62 %
Meningkatnya derajat pendidikan	1 Indeks Pembangunan Manusia	78.13 %
masyaratakat dengan perluasan	Angka melek huruf seluruh penduduk	100.00 %
akses pendidikan yang murah dan	2 Angka melek harar selarah penadaak	100.00 %
terjangkau sarana dan fasilitas yang	3 Nilai UN dan UAS rata-rata	
memadai, tenaga guru yang cukup	- Nilai UN rata-rata SD	5.50
dan mutu yang terus membaik	- Nilai UAS rata-rata SD	7.50
dan mata yang teras memban	- Nilai UN rata-rata SLTP	5.50
	- Nilai UAS rata-rata SLTP	8.00
	- Nilai UN rata-rata SLTA	5.50
	- Nilai UAS rata-rata SLTA	8.00
	- Nilai UN rata-rata paket A	6.00
	- Nilai UAS rata-rata paket A	8.00
	- Nilai UN rata-rata paket B	6.00
	- Nilai UAS rata-rata paket B	8.00
	- Nilai UN rata-rata paket C	6.00
	- Nilai UAS rata-rata paket C	8.00
	4 Angka kelulusan	100.00.00
	- SD	100.00 %
	- SLTP	100.00 %
	- SLTA	100.00 %
	5 Angka putus sekolah - SD	0.06
	- SLTP	0.05
	- SLTA	0.03
	6 Angka rata-rata lama sekolah	0.00
	- SD	6 Tahun
	- SLTP	3 Tahun
	- SLTA	3 Tahun
	7 Angka partisipasi murni	
	- SD	98.00 %
	- SLTP	90.00 %
	- SLTA	91.00 %
	8 Angka partisipasi kasar	
	- SD	103.00 %
	- SLTP	97.00 %
	- SLTA	92.00 %
	9 Rasio ketersediaan sekolah terhadap	
	penduduk usia sekolah	
	- SD	1 : 192 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	- SLTP	1 : 672 %
	- SLTA	1 : 735 %
	10 Rasio jumlah RKB terhadap murid	1:32
	pada tingkat SD	
	11 Rasio jumlah RKB terhadap murid	1:32
	pada tingkat SLTP	4 00
	12 Rasio jumlah RKB terhadap murid	1:32
	pada tingkat SLTA	1 : 20
	13 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1.20
	14 Rasio guru terhadap murid pada	1 : 20
	tingkat SLTP	1.20
	15 Rasio guru terhadap murid pada	1:20
	tingkat SLTA	
3 Meningkatnya derajat kesehatan	1 Angka usia harapan hidup	71 Tahun
masyarakat	Angka prevalensi penyakit	
	- Malaria	< 1 ‰
	- TBC	221/100.000 Pddk
	- DBD	< 3 %
	- HIV	0,1/1.000 Pddk
	3 Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk)	
	- Karena penyakit Malaria	< 2 per 100.000 Pddk
	- Karena penyakit Malaha - Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000 Pddk
	- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000 Pddk
	- Karena penyakit HIV	<5 per 100.000 Pddk
	4 Angka kesembuhan penderita TB paru	89.00 %
	5 Angka kematian bayi per 1000	3/1.000 KH
	kelahiran hidup	
	6 Angka kematian balita	3/1.000 KH
	7 Angka kematian ibu melahirkan per	72/100.000 KH
	100.000 kelahiran hidup	
	8 Persentase balita gizi buruk	<0,2 %
	9 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	20 : 100.000 Pddk
	10 Rasio dokter gigi per 100.000	9:100.000 Pddk
	penduduk	
	11 Rasio bidan per 100.000 penduduk	120 : 100.000 Pddk
	12 Rasio perawat per 100.000 penduduk	230 : 100.000 Pddk
	13 Rasio Posyandu terhadap balita	1:60 Balita
	14 Rasio Puskesmas per satuan	1:20.000 Pddk
	penduduk	
	15 Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 15.000 Pddk
	16 Persentase kecamatan bebas rawan	100 %
	gizi	400.07
	17 Persentase kelurahan terkena KLB	100 %
	yang ditangani < 24 jam	100 %
	18 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100 %
	19 Persentase persalinan oleh tenaga	90.00 %
	kesehatan	73.00 70

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
	20 Rasio pederita malaria terhadap jumlah penduduk - Annual Malaria Incidence (AMI) - Annual Parasite Incidence (API)	10.00 < 1	
4 Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	1 Rasio belanja langsung terhadap total belanja	55.00	%
	2 Rasio belanja modal terhadap total belanja	30.00	%
	Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100.00	%
	4 Persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP	100.00	%
	5 Persentase peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan6 Persentase peningkatan infrastruktur	100.00	%
	lingkungan - MCK Komunal	16.67	%
	- Drainase /gorong-gorong	14.79	
	- Jalan lingkungan	7.34	
	7 Persentase pemberian bantuan	100.00	%
	pembinaan bagi generasi muda 8 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	40	KK
5 Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	·	12	lokasi
	Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan	75.58	%
Secura terpada	Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	64.00	%
	Jumlah tempat pedagang kaki lima di pusat kota yang direlokasi	2	lokasi
6 Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan	1 Persentase PNS yang memperoleh penghargaan	8.00	%
	2 Persentase PNS yang diberikan sanksi berat	0.50	%
kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	3 Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100.00	%
	4 Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	40.00	%
	5 Jumlah wilayah bebas korupsi	3	SKPD
7 Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.	pemuda yang diberikan modal usaha	3	Klp.
	ng 2 Nilai modal kerja dan investasi UKM	825,523,416,220.00	Rp
Raki iiria dari pedagang tradisiona	3 Nilai omzet UKM	1,772,293,538,270.00	Rp
	4 Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	23	Klp.
	5 Tingkat pengangguran terbuka 6 Pendapatan perkapita	4.10 3,359,400	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	7 Laju pertumbuhan ekonomi 8 Tingkat Inflasi	8.35 % 4.50 %
8 Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan	Jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	6 SKPD
berkualitas	2 Jumlah layanan perizinan bebas biaya	2 jenis
	3 Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana	10 Tempat
	memadai 4 Rasio penduduk ber-KTP	1 : 0,8
	5 Rasio penduduk ber-KK	1:0,8
	6 Rasio bayi ber-akte kelahiran	1 : 0,6
	7 Persentase ketersediaan armada sampah	60.47 %
	Jumlah SKPD yang telah disurvey integritas pelayanan publik	8 SKPD
Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan	42 Klp.
masyarakat posisii	Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan	4 Klp.
	Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	25 Klp.
10 Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-	100.00 %
keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya	Quran 2 Jumlah Taman Pengajian Al-Quran yang dibina	150 TPQ
	Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	4 Kali
	4 Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan	40 Orang
	5 Menurunnya pertumbuhan PMKS	7.00 %
	6 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100.00 %
	7 Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate	8.00 %
	8 Persentase situs budaya yang dilestarikan	41.38 %
11 Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	15 Perda
	Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat	100 %
	diselesaikan 3 Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	15 kasus

PEMERINTAH KOTA TERNATE LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014